

**LAPORAN AKHIR**

# **KAJIAN PENDAHULUAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2019



## Kata Pengantar

Laporan penelitian pendahuluan tentang penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dalam rangka untuk memahami dan mengetahui permasalahan tentang ketimpangan dan kemiskinan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan, namun upaya tersebut belum diimbangi dengan tingkat penurunan kemiskinan yang signifikan.

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan dua masalah besar yang ada di DIY. Peran selaku pemerintah yang kami lakukan adalah mendorong dan menjalankan program kegiatan yang fokus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah DIY juga menjadi fokus kami. Bukan hanya pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga apa yang dicita-citakan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk itulah upaya yang strategis melalui kajian ini perlu dikembangkan sehingga dapat membantu kami dengan mudah melakukan langkah-langkah



strategis penanggulangan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kajian ini, utamanya kepada para informan, kepala desa lokasi penelitian, dan informan lainnya atas keluangan waktu yang telah diberikan.

Laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terbuka kesempatan untuk memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah DIY untuk mengambil kebijakan strategis di masa mendatang.

Yogyakarta, Desember 2019

Kepala Bappeda DIY

Drs. Budi Wibowo, S.H., M.M



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
BAB 1 Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pikir.....	9
BAB II Gambaran Ketimpangan dan Kemiskinan di DIY .....	15
2.1 Ketimpangan di DIY .....	15
2.2 Gambaran Kemiskinan di Lokasi Penelitian .....	18
2.3 Banyaknya Penduduk Lansia Pada Rumah Tangga Miskin .....	22
2.4 Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin Masih Rendah .....	24
2.5 Marginalisasi Pertanian Sebagai Penyebab kemiskinan di Desa.....	26
BAB III Problematika Program Perlindungan Sosial.....	31
3.1 Kesalahan <i>Targeting</i> Program Perlindungan Sosial Merupakan Ancaman Bagi Modal Sosial dan Solidaritas Sosial Di Masyarakat. ....	31
3.2 Permasalahan Program perlindungan Sosial di Lokasi Penelitian. ....	37



BAB IV Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Desa Menjadi Solusi Penurunan Kemiskinan.....	47
4.1 Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.....	48
4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Desa.....	50
4.3 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Harus Berkontribusi Pada Penurunan Kemiskinan.....	53
BAB V Agenda Kegiatan <i>Profiling</i> Rumah Tangga Miskin dan Penyusunan Desain Pemberdayaan Masyarakat Terintegratif Melalui Community Based Economic Development (CBED).....	57
5.1 Latar Belakang.....	57
5.2 Tujuan Kegiatan .....	60
5.3 Data yang Akan Dikumpulkan.....	60
5.4 Ruang Lingkup Kegiatan.....	61
Sumber : Pemikiran Peneliti .....	63
5.5 Tenaga dan Kriteria yang Dibutuhkan.....	64
BAB VI Kesimpulan dan Saran .....	65
6.1 Kesimpulan .....	65
6.2 Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	69
Lampiran	





## **BAB 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan atas pangan bergizi yang memadai ditambah dengan kebutuhan non-makanan yang minimum (Wolff, Lamb, & Zur-szpiro, 2015). Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu (multi dimensi). Keadaan multi dimensi inilah yang membutuhkan penanganan tidak hanya menyangkut faktor ekonomi semata tetapi juga menyangkut faktor sosial, politik dan budaya. Meski demikian, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan sosial, politik dan budaya menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan (Ikhsan, 2010).

Dinamika penurunan kemiskinan pada konteks Indonesia utamanya selepas Krisis Keuangan Asia 1997/1998 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meskipun dilanda krisis ekonomi yang berat, kinerja ekonomi dapat cepat pulih dan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada kisaran 5-6 persen. Keberhasilan ini mampu memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan hingga lebih dari separuhnya (The World Bank, 2015). Peningkatan kesejahteraan agregat diraih dengan pendapatan per kapita yang naik hingga menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Fantom & Serajuddin, 2016). Namun, perlambatan laju penurunan kemiskinan yang dialami oleh Indonesia



beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan besar terhadap pemerataan manfaat pembangunan ekonomi yang telah diraih tersebut. Sebelum Krisis Keuangan Asia (1976 hingga 1996), penurunan kemiskinan Indonesia mencapai rata-rata tahunan 1,44 persen. namun berkurang hingga hanya 0,61 pada periode 2002 hingga 2010 (Suryahadi, Hadiwidjaja, & Sumarto, 2012). Sepanjang 2011-2014 tingkat kemiskinan Indonesia tidak beranjak jauh dari kisaran 11-12 persen. Bahkan, penurunan kemiskinan Indonesia antara 2012-2013 hanya sebesar 0,5 poin dan merupakan penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir (The World Bank, 2014). Hingga tahun 2017 masih terdapat sekitar 28 juta atau 10,6 persen penduduk Indonesia yang masih perlu diungkit kesejahteraannya, dan sebagian besar di antaranya berada di wilayah pedesaan (Warda, Elmira, Rizky, Nurbani, & Izzati, 2018).

Perlambatan laju penurunan kemiskinan terjadi bersamaan dengan stagnasi penurunan ketimpangan. Setelah Krisis Keuangan Asia 1997/1998, pada kurun waktu 1999 hingga 2011 ketimpangan Indonesia naik 32 poin, dengan peningkatan indeks Gini dari 0,311 menjadi 0,410. Sejak itu, ketimpangan memang cenderung tidak naik namun terus mengalami stagnasi, dengan kisaran Gini yang tidak beranjak turun dari 0,4. Baru pada 2016 dan 2017, indeks Gini menurun sedikit ke angka 0,397 dan 0,393. Indeks Gini yang menyentuh kisaran 0,4, selain mengindikasikan ketimpangan di dalam negara yang tinggi, hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi di antara negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan di antara negara kelompok pendapatan menengah bawah dunia (The World Bank, 2016).

Kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah sepanjang masa bagi kehidupan manusia, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak yang berasal dari keluarga miskin tentunya kesulitan untuk mengenyam pendidikan layak yang berdampak pada terbatasnya akses pekerjaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Melalui proses pewarisan kemiskinan ini, anak keturunan dari keluarga miskin pada usia dewasanya akan tetap menjadi keluarga miskin. Dengan demikian proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan tersebut.





Permasalahan kemiskinan merupakan masalah besar yang hampir dialami oleh sebagian besar negara di dunia, utamanya negara berkembang. Bahkan melalui protokol *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang merupakan lanjutan dari program *Milennium Development Goals* (MDG's) menempatkan permasalahan kemiskinan sebagai tujuan pertama dari tujuh belas (17) tujuan yang harus dientaskan dari muka bumi. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sangat beragam. Upaya tersebut diantaranya adalah: (1) Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kriteria tertentu; (2) Program Raskin (yang sekarang menjadi Rastra/Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah; dan (3) Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk dan telah dibina melalui Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial (Ernada dan Gaol, 2015). Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan telah menunjukkan hasil yang nyata yaitu berupa penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14% pada tahun 2000, turun menjadi sekitar 11,22% pada tahun 2015 (persentase nasional).

Penurunan kemiskinan pada level nasional sejalan dengan penurunan kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun dari sisi persentase penduduk miskin masih diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin pada level nasional masih 9,66 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di DIY masih 11.81 persen. Dari data ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di DIY merupakan salah satu kemiskinan yang parah di Indonesia. DIY menjadi salah satu propinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak dan termiskin di Pulau Jawa (kumparan.com, 2018).

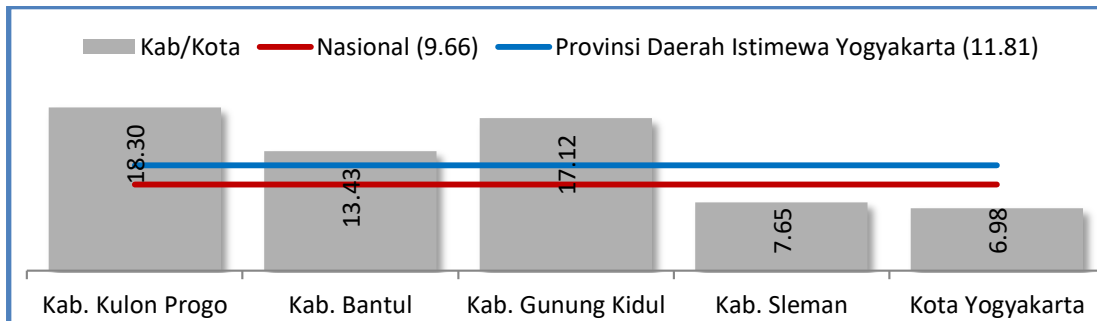
Perbandingan persentase kemiskinan antar kabupaten menempatkan Kabupaten Kulonprogo (18,30 %) menjadi kabupaten termiskin di DIY pada tahun 2018, disusul dengan Kabupaten Gunungkidul (17,12), dan Kabupaten Bantul (13,42 %). Ketiga kabupaten tersebut memiliki persentase penduduk miskin diatas rata-rata propinsi dan nasional. Sedangkan untuk kabupaten



2019

Sleman (7,65 %) dan Kota Yogyakarta (6,98 %) menjadi kabupaten/kota dengan jumlah persentase kemiskinan terendah.

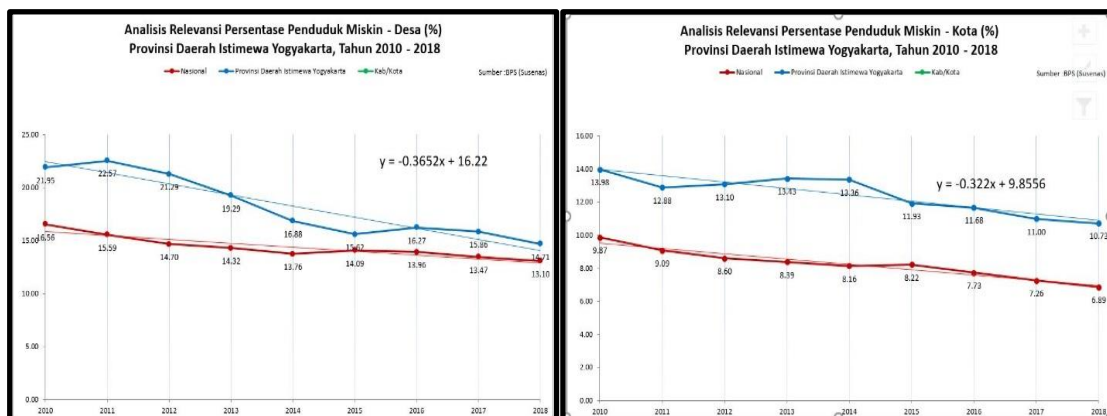
**Grafik 1.1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa**



Sumber : BPS (Susenas)

Secara umum persentase penduduk miskin jika dibandingkan antara wilayah desa dan kota di DIY mengalami kesenjangan. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan penurunan kemiskinan, masyarakat desa relative lebih cepat terentaskan dari belenggu kemiskinan dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Meskipun dari sisi angka apsolut, penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan. Banyak faktor yang menyebabkan laju penurunan kemiskinan di pedesaan lebih baik, salah satunya adalah adanya Dana Desa (DD) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015. Adanya dukungan sumber dana yang besar masuk ke pedesaan telah menjadi spirit bagi masyarakat desa untuk mengejar ketertinggalannya dengan masyarakat perkotaan.

**Grafik 1.2 Relevansi Persentase Penduduk Miskin Desa/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2010-2018**



Sumber : BPS (Susenas)



Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan kemiskinan di wilayahnya merupakan perjuangan yang berat. Pada tahun 2018 antara realisasi dan target tidak ada yang tercapai, baik itu pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. DIY menargetkan pada tahun 2018, kemiskinan turun menjadi 11,23 persen namun realisasinya hanya turun 11,81 persen. Kabupaten Kulonprogo menargetkan turun 17,03 persen realisasinya hanya turun 18,30 persen. Kabupaten Bantul menargetkan kemiskinan menjadi 12,13 persen realisasinya hanya 13,43 persen. Kabupaten Gunungkidul menargetkan 16,03 persen realisasinya 17,12 persen. Kabupaten Sleman menargetkan 7,05 persen realisasinya hanya mampu turun 7,65 persen. dan Kota Yogyakarta yang menargetkan 6,91 persen realisasinya hanya turun menjadi 6,98 persen.

**Tabel 1.1 Target Penurunan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di daerah Istimewa Yogyakarta**

Target Penurunan Kemiskinan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	11,23	10,19	9,11	8,07	7,00
Kulon Progo	17,03	14,98	12,94	10,89	8,85
Bantul	12,13	10,86	9,59	8,32	7,05
Gunungkidul	16,03	14,30	12,56	10,83	9,09
Sleman	7,05	6,87	6,36	6,01	5,67
Yogyakarta	6,91	6,24	6,15	6,00	5,45

Sumber : RPJMD DIY 2018-2022

Peran pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi terus membaik, tentunya pertumbuhan tersebut haruslah bersifat inklusif. artinya dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan bisa dinikmati oleh segenap masyarakat luas. Terciptanya ketimpangan ekonomi pada masyarakat pastinya berdampak pada masalah sosial. Menurut Iryanti (2014) ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar kelompok ekonomi dapat berakibat pada: (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi, karena berkurangnya skala ekonomi pasar; (2) Berkurangnya kohesi sosial dan politik di kalangan masyarakat karena terjadinya persepsi publik tentang kesejahteraan yang belum adil dan merata; dan (3) Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari



kemiskinan yang akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang kerap terjadi utamanya di DIY. Untuk itu Pemda DIY diharapkan bisa mendorong dan menjalankan program kegiatan yang fokus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan di wilayah desa dan kota di DIY juga harus menjadi fokus Pemerintah DIY. Bukan hanya pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan, dan apa yang dicita-citakan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kolaborasi multiaktor penting dilakukan untuk menghasilkan inovasi dalam mengentaskan kemiskinan di DIY. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting adanya dalam rangka untuk memberikan gambaran dan analisa tentang kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY guna dirumuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY dalam kaitannya dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kajian juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah utamanya pemerintah desa dalam upaya untuk pengembangan ekonomi berbasis potensi desa guna penanggulangan kemiskinan yang lebih cepat dan



sistematis. Selain itu, penelitian nantinya juga dijadikan dasar dalam penyusunan desain kegiatan studi lanjutan pada tahun 2020 agar kerangka acuan kerja yang harus dilakukan untuk tahun berikutnya sudah tersusun secara baik.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan teknik analisis deskriptif. pendekatan *mixed methods* menggunakan cara *sequential explanatory design* dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian secara komprehensif. Teknik ini menempatkan pendekatan kuantitatif sebagai acuan pokok dalam penggalian data kualitatif (Cresswell, 2010). Data kuantitatif diperoleh berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K pada tahun 2015. BDT yang digunakan ini merupakan basic data yang digunakan dalam penentuan rumah tangga penerima program perlindungan sosial. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis data sekunder. Data yang terdapat dalam BDT diantaranya adalah jumlah 40 persen rumah tangga termiskin di tiap desa se DIY (Desil 1-4). Dari data tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kecacatan, penyakit kronis, dan kepemilikan beberapa kebutuhan dasar lainnya (rumah, listrik, sanitasi, dll).

Penelitian ini di desain untuk merepresentasikan 4 (empat) wilayah yang ada di DIY. Ke-empat wilayah tersebut merupakan wilayah kecamatan yang masing-masing kecamatan mewakili kabupaten. Adapun keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tempel sebagai representasi wilayah utara yang mewakili Kabupaten Sleman. Kecamatan Imogiri sebagai representasi wilayah Selatan dan mewakili Kabupaten Bantul, Kecamatan Kokap sebagai representasi wilayah barat dan mewakili Kabupaten Kulonprogo, seta Kecamatan Panggang sebagai representasi wilayah timur dan mewakili Kabupaten Gunungkidul.



Dari masing-masing kecamatan yang sudah terpilih tersebut, untuk selanjutnya dipilih desa-desa yang representatif untuk penelitian ini. Setiap kecamatan diambil 4 desa sebagai lokus penelitian. Penentuan ke-empat desa didasarkan pada jumlah desil 1 (satu) terbanyak di kecamatan tersebut. Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan desa-desa lebih dikarenakan pada tujuan untuk melihat bagaimana pola kemiskinan dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di tiap desa.

**Tabel 1.2 Daftar Lokasi Kecamatan dan Desa Wilayah Penelitian**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Kecamatan Kokap-Kabupaten Kulonprogo	Hargomulyo
		Hargorejo
		Hargotirto
		Kalirejo
2	Kecamatan Panggang-Kabupaten Gunungkidul	Giriharjo
		Girikarto
		Girimulyo
		Girisekar
3	Kecamatan Tempel – Kabupaten Sleman	Banyu Rejo
		Lumbung Rejo
		Merdiko Rejo
		Pondok Rejo
4	Kecamatan Imogiri – Kabupaten Bantul	Karang Tengah
		Selopamioro
		Sriharjo
		Wukirsari

Sumber : Data Primer

Data sekunder lain yang digunakan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran desa, data hasil penelitian Perubahan Sosial dan Potensi Konflik DIY tahun 2017, dan juga data-data dari Bappeda dan BPS DIY. Penggunaan data sekunder dalam analisa data lebih pada fungsi triangulasi sumber, agar validitas atas data yang dikumpulkan dapat diyakini kebenarannya.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa informan terkait. Pemilihan informan sendiri dilakukan dengan menggunakan *purposive* sampling yakni informan dipilih berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan ialah individu dan lembaga yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Adapun informan tersebut adalah unsur dari



Bappeda kabupaten, dinas sosial kabupaten, TKSK Kecamatan, TKPKD, pendamping PKH, kepala desa dan aparat desa. Pengambilan data dilakukan melalui indepth interview dengan informan yang bersangkutan. *Indepth Interview* sendiri ialah proses dialektis antara peneliti dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman dari sudut pandang subjektif informan. Data yang didapatkan dari hasil *indepth interview* kemudian di display untuk dapat melihat teks secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan koding dan kategorisasi data, serta mendeskripsikan pola dan tema yang muncul (Creswell, 2008).

Selain itu peneliti juga memperkuat hasil temuan dengan melakukan studi literature. Studi literatur merupakan salah satu pendekatan menggunakan berbagai berita, jurnal, dan artikel yang relevan dengan fenomena terkait dengan rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk membangun wacana yang kuat, relevan, dan kontekstual mengenai teori dan berbagai data yang berkaitan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen yang tersedia di lapangan baik berupa data, laporan, dan foto sebagai bahan pendukung dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## 1.5 Kerangka Pikir

### Teori Kemiskinan

Secara teoretis kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (standart) minimal. Bank Dunia (2004) secara operasional mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk berobat, ketiadaan akses ke sekolah dan ketidakmampuan membaca, tidak adanya pekerjaan dan kekhawatiran akan kehidupan dimasa yang akan datang, sanitasi yang buruk, serta ketidakberdayaan dan kebebasan dalam politik. Sedangkan definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia utamanya dalam mengukur kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/kapita/hari) maupun kebutuhan dasar non-makanan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional sehingga secara definisi juga sangat beragam. Kuznetz (1954) mendasarkan definisi kemiskinan pada





pendapatan rata-rata per kapita. Myrdal (1957) melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidakseimbangan produksi dalam suatu wilayah. Efek polarisasi yang diciptakan oleh sistem kapitalis menjelaskan kemiskinan yang meningkat karena berpindahnya faktor produksi dari daerah pinggiran ke daerah yang lebih maju. Selain itu, Myrdal juga mengatakan adanya keterkaitan antara kemiskinan dengan faktor alam.

Amartya Sen mendefinisikan kemiskinan sebagai "*the failure to have certain minimum capabilities*". Definisi ini mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin (Sen, 1985). Sumardjan (1997) membedakan 4 (empat) pola kemiskinan. Pertama, kemiskinan individual, yakni kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seseorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Kedua, kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang dilihat dengan membandingkan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau rumah tangga di suatu komunitas. Ketiga, kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang disandang oleh suatu golongan yang "*built in*" atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat; dan keempat, kemiskinan budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

### Teori Ketimpangan

Dalam mengukur ketimpangan suatu wilayah, pendekatan yang sering dilakukan adalah mengukur gini rasio. Secara pengertian gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille).

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah dengan melihat besarnya kontribusi 40 persen penduduk termiskin atau biasa disebut dengan desil 1-4. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek





kemiskinan yang diukur berdasarkan kemiskinan relatif. Dalam konteks di Indonesia, pendekatan yang dilakukan dalam mengukur ketimpangan melalui pendekatan pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari data Susenas.

Para ahli ekonomi umumnya membedakan ukuran ketimpangan dalam 2 (dua) hal. Pertama, distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*). Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatanpun turut diabaikan. Kedua, distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumberdaya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan.

### **Peran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menurunkan Kemiskinan**

Dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang sering dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan, selain program-program bantuan yang langsung diberikan kepada mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang dianggap mampu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan masyarakat miskin berarti berupaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan peningkatan kualitas hidupnya.



Menurut Rappaport dalam Suharto (1998); “*pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya*”. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian. Menurut Edi Suharto (1985) Pemberdayaan sebagai proses memiliki 5 (lima) dimensi yaitu:

1. *Enabling*; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.



Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian yang lebih luas, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

Untuk pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi (Kartasasmita, 1996), yaitu: *pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, informasi, modal, lapangan kerja, pasar dan pengadaan infrastruktur yang memadai. *Ketiga*, pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Melindungi berarti mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Untuk itu, perlu program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan ini

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat, adalah konsep yang relatif baru dan bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada "proyek" (Kartasasmita, 1996), artinya, peran birokrasi yang besar dan seringkali dijalankan sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, tapi masyarakat itu sendiri tidak terlibat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung kepada program-program yang



diberikan, karena pada dasarnya setiap yang dihasilkan harus berdasarkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Sumodiningrat, 1997).

Berdasarkan konsep di atas menurut Kartasasmita (1996), dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan. *Pertama*, upaya pemberdayaan harus terarah (*targetted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah sesuai kebutuhannya. Program ini harus langsung mengikutsertakan masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. *Kedua*, pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat kurang berdaya, sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien. *Ketiga*, kelompok pendamping, untuk membantu mereka dalam memperbaiki kesejahteraannya. Fungsi kelompok pendamping adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat, sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membantu mencari cara pemecahan masalah.

Kartasasmita (1996) menekankan pemberdayaan yaitu memberi peran kepada lapisan bawah dalam proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah. Pemerintah berperan untuk mengurangi hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dan menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus bersifat multidimensional dan bersama-sama. Karena dalam kenyataan mereka yang tidak berdaya secara ekonomi hampir secara otomatis tidak berdaya secara sosial, politik, budaya dan hukum (Tjandraningsih dan Tjondronegoro, 1997).



## **BAB II**

### **Gambaran Ketimpangan dan Kemiskinan di DIY**

#### **2.1 Ketimpangan di DIY**

Permasalahan ketimpangan dan kemiskinan merupakan persoalan besar yang hingga saat ini belum tertangani secara baik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasinya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gambaran mengenai kemiskinan yang ada di DIY cukup unik. Predikat DIY sebagai wilayah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi pada satu sisi, namun di sisi yang lain menjadi propinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi se Pulau Jawa dan urutan termiskin ke-12 secara nasional. Kontradiksi ini menimbulkan anggapan bahwa masyarakat yang ada di DIY bahagia dengan kemiskinannya (Candra, 2017).

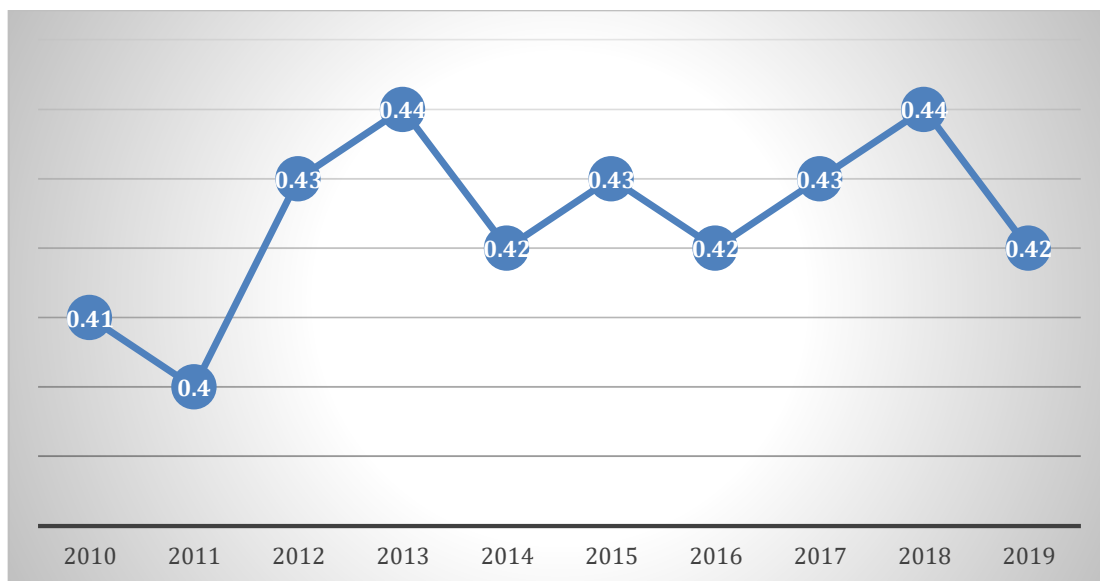
Persentase penduduk miskin di DIY setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin masih 11.81 persen atau setara dengan 450.250 jiwa. Jumlah ini diukur dengan batas garis kemiskinan sebesar Rp. 409.744/kapita/bulan. Penggunaan parameter pengeluaran dalam mengukur garis kemiskinan dinilai memiliki kelemahan dalam melihat kemiskinan yang ada di DIY. Masyarakat DIY memiliki budaya lokal yang menyebabkan parameter pengeluaran dinilai kurang tepat (Kabarkota.com, 2019).

Pertumbuhan ekonomi di DIY mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2017. Tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,26 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 129,87 triliun rupiah (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019b). Adapun sektor



usaha yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Besarnya kontribusi sektor-sektor tersebut ditopang oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata yang ada di DIY. Namun sayangnya, pertumbuhan perekonomian tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan gini rasio (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019a). Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan ekonomi di DIY justru dinikmati oleh kalangan kelas tertentu dan tidak merembes pada kelompok masyarakat bawah.

**Grafik 2.1 Perkembangan Gini Rasio Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2010-2019**



Sumber : BPS, Diolah

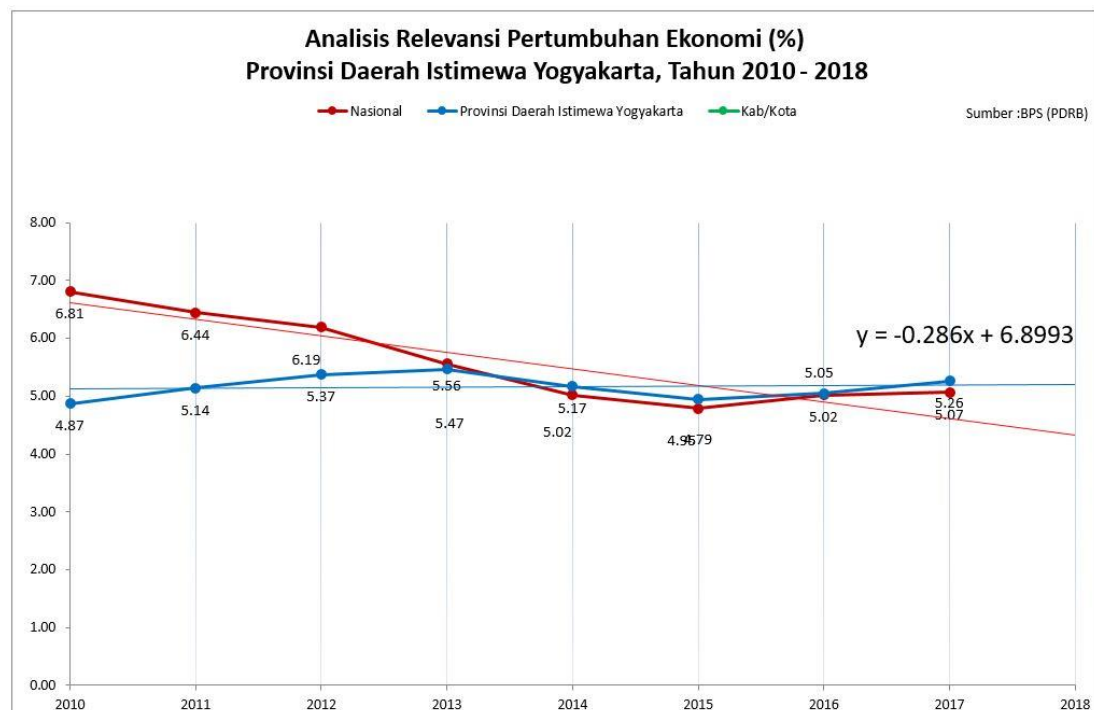
Gini rasio adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Koefisien Gini 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan koefisien 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sangat menarik untuk dicatat bahwa peningkatan tajam ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di DIY kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat di tahun 2012 dengan nilai indeks 0.43 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 cenderung fluktuatif dan cenderung tidak menunjukkan trend penurunan.

Sebuah fakta yang memprihatinkan bahwa ketimpangan yang ada di DIY mengalami peningkatan manakala pertumbuhannya juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang



ada di DIY belum inklusif, artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Gambaran ini sejalan dengan kondisi yang ada di Indonesia sebagaimana laporan Bank Dunia yang dirilis pada Desember 2015 mengklaim bahwa hanya 20 persen populasi terkaya di Indonesia yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi selama satu dekade, yang menyiratkan bahwa 80 persen populasi (atau 200 juta orang secara absolut) dibiarkan dibelakang (Tjoe, 2018). Ini adalah angka yang mengkhawatirkan.

**Grafik 2.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2017**



Sumber : BPS (PDRB)

Tingkat ketimpangan yang tinggi dalam masyarakat adalah ancaman karena tidak hanya membahayakan kohesi sosial tetapi juga membahayakan stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan distribusi kekayaan yang lebih setara cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang tinggi (The World Bank, 2015).

Kondisi DIY jika dilihat dari sisi geografis sangat beragam. Keberagaman geografis ini juga berpengaruh terhadap ketidaksetaraan antar wilayah. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan guna menekan jarak ketimpangan





tersebut adalah meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat DIY dengan mendorong pengembangan sektor padat karya khususnya sektor pertanian dan industri manufaktur. Kedua sektor usaha ini merupakan bidang pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat yang ada di DIY.

Untuk mencapai hal itu, maka penting bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi langsung di industri padat karya ini. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat iklim investasi pada industri padat karya lebih dipermudah. Selain itu, pemerataan dari sisi infrastruktur juga harus dilakukan, utamanya dari sisi fasilitas transportasi, karena ketersediaan prasarana dan sarana transportasi akan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di suatu wilayah. Wilayah-wilayah yang semula terisolasi dan terbelakang akan berubah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga berbagai potensi wilayah dapat dimaksimalkan.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan (secara struktural) di antara berbagai wilayah perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah. Apalagi jika kita sandingkan dengan potensi dan daya tarik DIY sebagai lokasi tujuan wisata diharapkan perbaikan infrastruktur mampu menjadi alternatif dalam perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Gambaran Kemiskinan di Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh TNP2K pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa 40 persen masyarakat terbawah di 16 desa lokasi penelitian berjumlah 16.236 rumah tangga yang terdiri dari 54.447 jiwa. Jumlah rumah tangga pada desil 1 sebanyak 5.125 yang terdiri dari 17.452 jiwa, Desil 2 memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 5.176 yang terdiri dari 16.372 jiwa. Desil 3 dengan jumlah rumah tangga 3.657 yang terdiri dari 12.550 jiwa. Sedangkan pada desil 4 memiliki jumlah rumah tangga 2.276 dengan jumlah individu sebanyak 8.073 jiwa. Adapun gambaran detail di masing-masing desa dapat dijabarkan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Individu pada Desil 1-4 di 16 Desa Lokasi Penelitian**

Kec	Desa	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	jumlah





<b>KOKAP</b>	HARGOMULYO	355	307	73	76	811	1,016	963	243	281	2,503
	HARGOREJO	374	393	126	90	983	1,016	1,095	429	280	2,820
	KALIREJO	370	319	74	55	818	1,170	969	278	195	2,612
	HARGOTIRTO	458	316	83	69	926	1,409	1,004	307	269	2,989
<b>IMOGIRI</b>	SELOPAMIORO	914	723	333	142	2,112	3,385	2,371	1,134	517	7,407
	SRIHARJO	356	384	199	118	1,057	1,131	1,117	662	425	3,335
	KARANG TENGAH	196	232	134	79	641	584	659	435	282	1,960
	WUKIRSARI	653	761	472	251	2,137	2,087	2,187	1,510	892	6,676
<b>PANGGANG</b>	GIRIHARJO	101	144	202	131	578	510	512	758	443	2,223
	GIRIMULYO	137	117	214	135	603	712	524	706	447	2,389
	GIRIKARTO	80	113	256	142	591	459	573	1,050	546	2,628
	GRISEKAR	139	135	346	269	889	744	657	1,357	996	3,754
<b>TEMPEL</b>	BANYU REJO	274	397	353	219	1,243	822	1,148	1,025	704	3,699
	PONDOK REJO	214	277	288	188	967	713	835	975	679	3,202
	LUMBUNG REJO	288	283	236	139	946	988	875	787	474	3,124
	MERDIKO REJO	216	275	268	175	934	706	883	894	643	3,126
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		5,125	5,176	3,657	2,278	16,236	17,452	16,372	12,550	8,073	54,447

Sumber : TNP2K (2015), diolah

Banyaknya rumah tangga miskin yang ada di desa-desa lokasi penelitian disebabkan karena sebagian dari anggota rumah tangga tersebut tidak produktif secara ekonomi, atau dengan kata lain memiliki status tidak bekerja, sehingga peran mereka dalam hal ekonomi rumah tangga tidak mampu menjadi penyokong untuk peningkatan pendapatan. jika kita klasifikasi berdasarkan kelompok umur memperlihatkan bahwa jumlah orang yang tidak bekerja pada umur 15-59 tahun berjumlah 26,96 persen. Sedangkan pada kelompok umur 60 tahun keatas jumlah individu yang tidak bekerja meningkat dengan jumlah 38,65 persen. Adapun detail jumlah individu yang bekerja dengan yang tidak bekerja untuk masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Jumlah Individu Desil 1-4 yang Bekerja dan Tidak Bekerja di 16 Desa Lokasi Penelitian**

Kec	Desa	Jumlah Individu Desil 1-4					
		Usia 15-59 Tahun			Usia 60 Tahun keatas		
		Bekerja (%)	Tidak Bekerja (%)	Jumlah	Bekerja (%)	Tidak Bekerja (%)	Jumlah
<b>KOKAP</b>	HARGOMULYO	71.93	28.07	1,361	60.49	39.51	577
	HARGOREJO	74.05	25.95	1,572	60.54	39.46	745
	KALIREJO	85.71	14.29	1,505	67.35	32.65	588



	HARGOTIRTO	83.91	16.09	1,691	75.87	24.13	688
<b>IMOGIRI</b>	SELOPAMIORO	77.52	22.48	4,551	67.47	32.53	1,374
	SRIHARJO	70.68	29.32	1,958	46.39	53.61	748
	KARANG TENGAH	70.72	29.28	1,185	51.63	48.37	399
	WUKIRSARI	70.73	29.27	3,919	55.07	44.93	1,271
<b>PANGGANG</b>	GIRIHARJO	75.55	24.45	1,329	76.40	23.60	483
	GIRIMULYO	77.92	22.08	1,327	68.71	31.29	572
	GIRIKARTO	82.75	17.25	1,565	62.28	37.72	562
	GIRISEKAR	79.22	20.78	2,127	74.86	25.14	907
<b>TEMPEL</b>	BANYU REJO	67.65	32.35	2,260	50.63	49.37	711
	PONDOK REJO	73.64	26.36	2,022	56.38	43.62	470
	LUMBUNG REJO	46.56	53.44	2,034	40.51	59.49	395
	MERDIKO REJO	65.38	34.62	1,924	53.40	46.60	485
<b>Rata-Rata</b>		73.04	26.96	32,330	61.35	38.65	10,975

Sumber : TNP2K (2015), diolah

Beban rumah tangga miskin selain karena banyaknya anggota rumah tangga yang tidak bekerja juga disebabkan karena adanya anggota rumah tangga yang mengalami penyakit kronis atau jenis penyakit yang menahun dan pada umumnya adalah penyakit tidak menular. Kehidupan modernitas yang mampu menghadirkan banyak kemudahan dalam membantu aktifitas manusia telah mengubah gaya hidup, pola makan, kualitas polusi udara dan lain sebagainya. Kondisi itulah yang menyebabkan perilaku kurang sehat, sehingga jenis penyakit yang muncul adalah penyakit yang menyerang organ-organ tubuh vital manusia.

Berdasarkan data dari The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menunjukkan bahwa jenis penyakit yang banyak menyebabkan kematian di dunia adalah penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler (healthdata.org, 2015). Pada tahun 2016, kematian akibat kardiovaskuler (jantung, pembuluh darah, stroke) mencapai 17,7 juta jiwa atau setara dengan 32,26 persen dari total kematian (COD) yang ada di dunia. Dari jumlah yang banyak tersebut sebagian besar berusia diatas 70 tahun (63 %), sisanya 29,13 persen berusia 50-59 tahun, 7,61 persen berusia 15-49 tahun (katadata.co.id, 2018).

Ciri dari jenis penyakit *kardiovaskuler* pada umumnya membutuhkan penanganan yang menahun, mudah menyerang organ tubuh lainnya, dan juga membutuhkan penanganan yang berkesinambungan. Ciri ini biasa dikenal dengan penyakit *degenerative*. Karena sifatnya yang sulit untuk diobati, menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan menjadi besar. Padahal



penggunaan jaminan kesehatan (utamanya JKN) tidak mampu mengcover semua biaya pengobatan tersebut. Belum lagi Kebijakan JKN dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kualitas layanan (Irwandy, Perdana, & Rislamind, 2013) (Awaliyah, 2018), ketersediaan tenaga medis (Kemenkes, 2018), termasuk juga aksesibilitas fasilitas kesehatan (Suharmiati, Handayani, & Kristiana, 2012) (Laksono, 2016) masih menjadi problem dalam pemberian pelayanan yang baik.

Keberadaan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan kesehatan kronis tentunya memperdalam kemiskinan pada rumah tangga tersebut. Karena beban pengeluarannya akan semakin besar dan itu pastinya menimbulkan gangguan ekonomi pada rumah tangga tersebut. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah dengan meningkatkan kegiatan promosi kesehatan melalui penyuluhan dan sosialisasi hidup sehat sebagai langkah preventif yang perlu di gencarkan.

Data dari TNP2K memperlihatkan bahwa di 16 desa lokasi penelitian terdapat banyak individu yang mengalami penyakit kronis. Secara keseluruhan jumlahnya mencapai 1.989 jiwa (desil 1-4). Jika dikelompokkan berdasarkan umur, maka usia 60 tahun keatas memiliki jumlah persentase tertinggi yaitu 54,45 persen. Usia 45-59 tahun berjumlah 27,35 persen. Sedangkan untuk usia 15-44 tahun berjumlah 13,88 persen, dan usia dibawah 15 tahun berjumlah 4,32 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah Individu Penderita Penyakit Kronis Desil 1-4 di 16 Desa Lokasi Penelitian**

Kec		Desa		Jumlah Individu Penderita Penyakit Kronis Desil 1-4								
				Usia dibawah 15 tahun		Usia 15-44 tahun		Usia 45-59 tahun		Usia 60 tahun keatas		Total
				P	L	P	L	P	L	P	L	
KOKAP	HARGOMULYO	0	0	4	4	4	3	25	25	65		
	HARGOREJO	1	1	5	4	8	6	19	11	55		
	KALIREJO	2	4	12	3	5	11	29	22	88		
	HARGOTIRTO	4	1	4	6	12	9	38	21	95		
IMOGIRI	SELOPAMIORO	17	6	19	24	39	45	55	64	269		
	SRIHARJO	8	4	7	14	16	36	56	59	200		
	KARANG TENGAH	0	1	5	3	8	10	16	16	59		
	WUKIRSARI	13	6	24	26	54	68	77	100	368		



<b>PANGGANG</b>	GIRIHARJO	0	0	2	3	3	7	14	3	32
	GIRIMULYO	2	0	2	7	6	11	18	22	68
	GIRIKARTO	1	2	5	7	5	12	21	22	75
	GIRISEKAR	4	2	8	12	18	15	58	57	174
<b>TEMPEL</b>	BANYU REJO	0	2	13	12	14	16	39	53	149
	PONDOK REJO	1	2	11	13	21	38	45	43	174
	LUMBUNG REJO	1	0	7	3	11	10	11	7	50
	MERDIKO REJO	0	1	2	5	5	18	20	17	68
<b>Jumlah</b>		54	32	130	146	229	315	541	542	1989

Sumber : TNP2K (2015), diolah

## 2.3 Banyaknya Penduduk Lansia Pada Rumah Tangga Miskin

Lanjut Usia yang kemudian dikenal dengan Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sebaran jumlah lansia yang paling tinggi di Indonesia dengan jumlah persentase sebesar 18,76 persen. Pada dasarnya, daerah-daerah dengan angka lansia sangat tinggi dapat menjadi tolok ukur bahwa provinsi tersebut adalah daerah yang tingkat kesehatannya baik, karena tingkat harapan hidupnya lebih tinggi. Namun pertanyaan besar berikutnya adalah, apakah keberadaan para lansia tersebut sejahtera atau tidak.

**Gambar 2.1 Persentase Jumlah Lansia Menurut Propinsi**



Sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2017)

Jumlah peningkatan usia harapan hidup tentunya tidak hanya menjadi



capaian luar biasa bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, karena diperlukan berbagai program untuk menangani keberlanjutan dari jumlah angka yang sudah ada. Program-program untuk lansia perlu diperhatikan demi mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih layak. Berdasarkan peraturan No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, pemerintah dan masyarakat harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok penduduk lansia. Seperti yang tertuang pada pasal 1 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Banyaknya jumlah lansia yang ada di DIY sejalan dengan data lansia pada Desil 1-4 di lokasi penelitian. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah lansia di 16 desa lokasi penelitian berjumlah 20,54 persen. Banyaknya lansia ini tentu menjadi problem tersendiri bagi rumah tangga miskin. Apalagi jika dikaitkan dengan data-data sebelumnya yang memperlihatkan bahwa para lansia tersebut 38,65 persen tidak bekerja dan 54,45 persen memiliki penyakit kronis. Bahkan secara perhitungan dependensi rasio (DR) antara usia muda dan usia tua masih lebih tinggi usia tuanya dengan nilai rasio 35.09, atau dengan kata lain 100 orang usia produktif (15-59 Tahun) menanggung beban sebanyak 35 orang yang berusia 60 tahun keatas. Gambaran detail dari jumlah lansia dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4 Jumlah Individu Desil 1-4 Berdasarkan Kelompok Umur di 16 Desa Lokasi Penelitian**

Kec	Desa	Usia di bawah 6 tahun	Usia 6 - 14 tahun	Usia 15 - 44 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	Jumlah	Jumlah Lansia (%)	DR Usia Tua
KOKAP	HARGOMULYO	207	358	813	548	577	2503	23.05	42.40



	HARGOREJO	188	315	929	643	745	2820	26.42	47.39
	KALIREJO	203	316	926	579	588	2612	22.51	39.07
	HARGOTIRTO	205	404	1026	665	688	2988	23.03	40.69
<b>IMOGIRI</b>	SELOPAMIORO	532	949	2998	1553	1374	7406	18.55	30.19
	SRIHARJO	211	418	1223	735	748	3335	22.43	38.20
	KARANG TENGAH	142	234	750	435	399	1960	20.36	33.67
	WUKIRSARI	505	981	2519	1400	1271	6676	19.04	32.43
<b>PANGGANG</b>	GIRIHARJO	138	273	856	473	483	2223	21.73	36.34
	GIRIMULYO	164	326	761	566	572	2389	23.94	43.10
	GIRIKARTO	202	299	964	601	562	2628	21.39	35.91
	GIRISEKAR	266	454	1362	765	907	3754	24.16	42.64
<b>TEMPEL</b>	BANYU REJO	253	475	1470	790	711	3699	19.22	31.46
	PONDOK REJO	250	459	1336	686	470	3201	14.68	23.24
	LUMBUNG REJO	225	470	1353	681	395	3124	12.64	19.42
	MERDIKO REJO	268	449	1271	653	485	3126	15.52	25.21

Sumber : TNP2K (2015), diolah

Guna meningkatkan kesejahteraan para lansia, maka pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Ada beberapa program perlindungan sosial untuk lansia, diantaranya adalah program bantuan jaminan kesehatan nasional yang diperuntukkan kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi di 40 persen masyarakat terbawah, dan 33 persen dari rumah tangga lansia mendapatkan manfaat dari program JKN-PBI (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional).

Selain jaminan dan layanan kesehatan pemerintah mempunyai program Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada 13 persen rumah tangga lansia. Program raskin/rasta untuk lansia juga diberikan sekitar 43 persen untuk rumah tangga lansia. Dan program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola langsung oleh kementerian sosial, memberikan 4,25 persen rumah tangga lansia. Program-program tersebut disiapkan oleh pemerintah agar memberikan dampak positif untuk lansia dan keluarganya.

## 2.4 Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin Masih Rendah

Pendidikan merupakan bagian terpenting dan menjadi kebutuhan dari kehidupan manusia. Pemerintah mempunyai program wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 dan PP No. 47/2008 untuk program wajib 9 tahun. Harapan dari regulasi tersebut sangat besar,



yakni agar ada peningkatan pendidikan yang berkualitas, serta ada keseimbangan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat luas. Munculnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mendorong masyarakat mulai berfikir bahwa pendidikan adalah sebuah layanan yang diberikan untuk masyarakat. Layanan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat karena pada dasarnya diberikan secara gratis pada seluruh masyarakat. Hal ini menjadi angin segar terutama masyarakat pedesaan yang berada pada perekonomian yang rendah. Harapan lain adalah meningkatkan minat masyarakat untuk sekolah formal yang kemudian akan mampu membantu menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian secara individu dan keluarga.

Lain halnya pandangan yang diberikan oleh Peneliti SMERU Research Institute bahwa, Program pendidikan wajib dan gratis 9 Tahun yang disampaikan pada peraturan pemerintah ini seolah-olah hanya sebagai wacana saja. Beban pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun masih ditanggung oleh orang tua murid, khususnya pembiayaan sekolah menengah turut membatasi akses warga miskin terhadap pendidikan. Orang tua murid masih menjadi sumber dana, seperti biaya pendaftaran ulang saat tahun ajaran baru, buku-buku, dan praktek lapangan (Heni Kurniasih dalam Astuti, 2017). Kasus tersebut merupakan contoh yang masih marak terjadi diberbagai daerah. Hal ini membuat masyarakat miskin seperti dikelabui oleh peraturan pemerintah, karena tidak sepenuhnya mendapatkan layanan pendidikan gratis. Efek dan dampak yang kemungkinan besar akan terjadi adalah, berkurangnya minat dari masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati pendidikan formal.

**Tabel 2.5 Persentase Jumlah Anak Tidak Bersekolah Pada Rumah Tangga Desil 1-4 di 16 Desa Lokasi Penelitian**

Kec	Desa	Persentase Anak Tidak Sekolah Desil 1-4		
		Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun
KOKAP	HARGOMULYO	11.23	6.45	0.38
	HARGOREJO	19.23	9.92	0.40
	KALIREJO	4.62	6.90	0.62
	HARGOTIRTO	11.21	12.50	0.40
IMOGIRI	SELOPAMIORO	6.43	15.03	0.56
	SRIHARJO	6.10	6.90	0.42
	KARANG TENGAH	11.35	20.00	0.41





	WUKIRSARI	14.57	13.66	0.44
PANGGANG	GIRIHARJO	10.00	5.83	0.49
	GIRIMULYO	11.67	19.23	0.60
	GIRIKARTO	22.98	15.38	0.62
	GRISEKAR	13.24	8.99	0.50
	BANYU REJO	8.29	6.63	0.34
TEMPEL	PONDOK REJO	9.25	4.12	0.34
	LUMBUNG REJO	6.55	2.30	0.36
	MERDIKO REJO	5.51	4.61	0.33
	<b>Rata-Rata</b>	10.76	9.90	0.45

Sumber : TNP2K (2015), diolah

Pada dasarnya pendidikan merupakan kebutuhan yang krusial karena *output* daripada pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang. Konsep investasi yang diharapkan adalah sebuah konsep investasi sumber daya manusia (*human capital investment*). *Human capital investment* dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Sederhananya adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi (Anwar, 2011).

Pada awalnya sebelum menjadi “investment”, konsep ini hanya pada konsep “human capital”, bahwa mengedepankan modal manusia untuk menunjang produktifitas manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kemampuan pada diri terkait dengan pengetahuan, ketrampilan, kompetensi serta sifat-sifat lainnya. Semua kemampuan itu tentunya akan mudah di olah dan mampu ditingkatkan apabila manusia tersebut mendapatkan pendidikan yang maksimal, baik sekolah formal maupun informal. Ketika sifat dasar yang dikembangkan dengan pendidikan tersebut sudah dan mampu terpenuhi, maka produktifitas yang meningkat berdampak pada peningkatan ekonomi (Haryati, 2009).

## 2.5 Marginalisasi Pertanian Sebagai Penyebab kemiskinan di Desa

Membicarakan tentang kemiskinan di 16 desa lokasi penelitian tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pedesaan dan pertanian. Berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa 40 persen (desil1-4) masyarakat

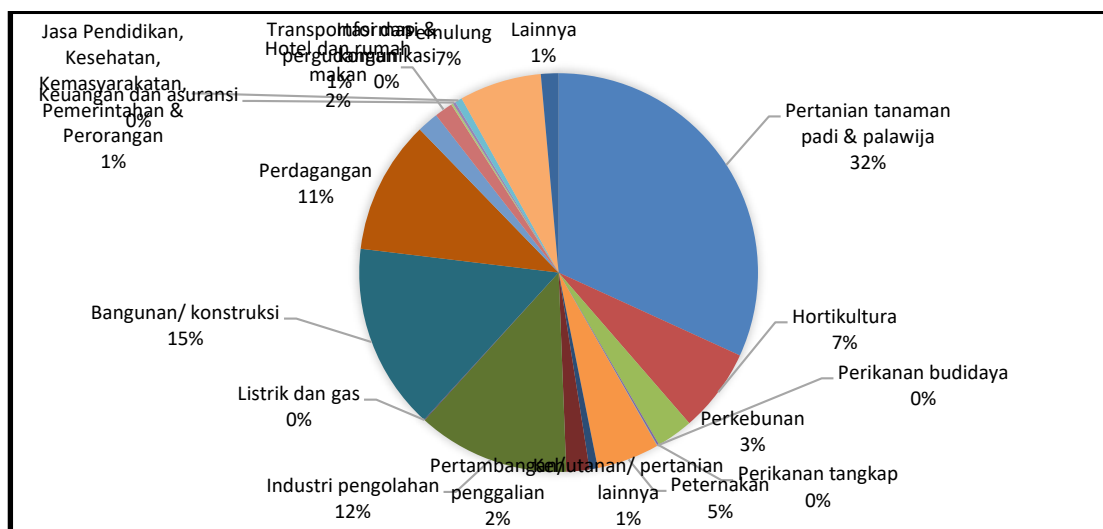




terbawah di lokasi penelitian sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sebanyak 32 persen masyarakat pada desil 1-4 bermata pencaharian sebagai petani tanaman padi dan palawija, 7 persen sebagai petani tanaman hortikultura, 3 persen sebagai petani perkebunan, dan 5 persen sebagai peternak.

Dalam konteks kemiskinan dan pertanian, petani selama ini kurang diuntungkan secara ekonomi dan politik oleh pemerintah (Suseno dan Suyatna 2007). Permasalahan kebijakan yang tidak memihak petani tergolong permasalahan struktural yang perlu diatasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani (Elizabeth, 2007). Kebijakan yang muncul selama ini merupakan kesalahan strategi pembangunan yang harus diubah dengan memberikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya domestik pada petani dan masyarakat secara berkeadilan (Sajogyo; Sajogyo, 2002).

**Gambar 2.2 Persentase Sektor Pekerjaan Pada Masyarakat Desil 1-4 di Lokasi Penelitian**



Sumber : TNP2K (2015), Diolah

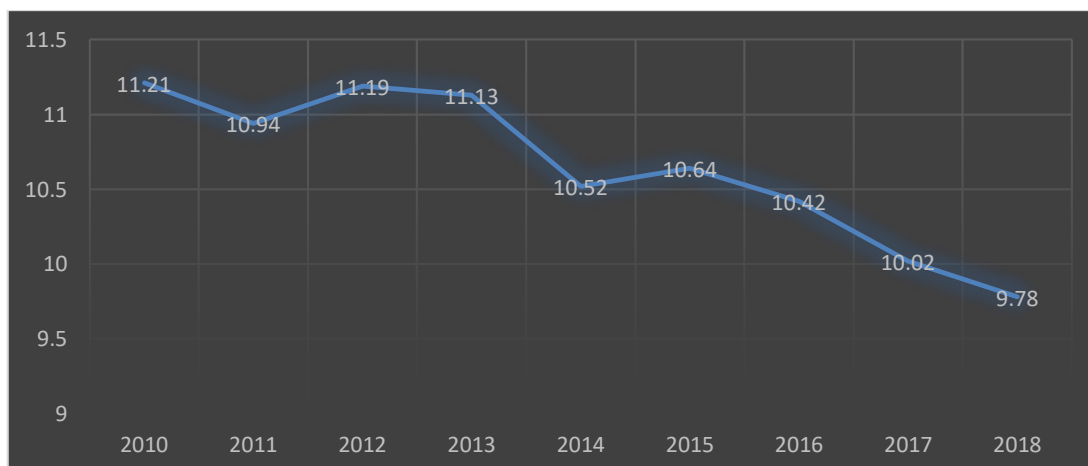
Marjinalisasi sektor pertanian cukup terasa manakala kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB) terus mengalami kemerosotan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di DIY masih 11,21 persen, namun pada tahun 2018 kontribusinya tinggal 9,78 persen (lihat gambar 2.5). Penurunan kontribusi sektor pertanian utamanya disebabkan oleh kepemilikan luas lahan yang sempit. Pada dekade tahun 1980-an, kepemilikan luas lahan di Jawa berkisar 0,5 Hektar (Hayami, Sajogyo, & Kikuchi, 1987), namun kondisi saat ini tinggal



0,25 hektar saja (Yustika & Baksh, 2016). Menyempitnya kepemilikan lahan pertanian pada akhirnya berdampak pada penurunan perekonomian para petani yang pada gilirannya akan menyebabkan kinerja perekonomian suatu wilayah akan terganggu (Lai, Peng, Li, & Lin, 2014).

Sempitnya luas lahan pertanian menyebabkan ongkos produksi menjadi sangat besar, tidak jarang para petani mengalami kerugian apalagi dengan perubahan iklim yang tidak menentu yang juga menjadi tantangan tersendiri. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, para petani harus mencari sumber-sumber pendapatan lain di luar sektor pertanian (*off-farm*). Cara ini merupakan langkah subsisten agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka tetap bisa terpenuhi. Problem berikutnya adalah upah yang harus mereka terima sangat kecil karena ketiadaan *skill* dan pengetahuan diluar sektor pertanian. Problem struktural ini harus dapat dilihat oleh pemerintah agar perbaikan kesejahteraan para petani dapat ditingkatkan.

**Grafik 2.3 Persentase Kontribusi Sektor Peranian terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018**



Sumber : BPS, Diolah

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberuntungan petani yang menyebabkan kemiskinan menurut (Deere & de Janvry, 1979) adalah; 1) *rent in labor service* atau dengan kata lain ketidakpunyaan kepemilikan lahan menyebabkan para petani hanya mampu menjadi buruh tani. 2) *rent in kind* atau jika mereka memiliki sedikit modal maka mereka akan menyewa lahan dengan sistem bagi hasil untuk bidang garapan, namun kendalanya adalah penentuan bagi hasil cenderung tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. 3) *rent in cash* atau jika tidak mau sistem bagi hasil maka mereka



akan menyewa secara utuh, sayangnya untuk mampu menyewa lahan garapan memerlukan modal yang cukup besar. 4) *appropriation of surplus value via the wage* atau dengan kondisi yang seperti ini maka upah menjadi sangat rendah. 5) *appropriation via price* yang maksudnya adalah kerugian petani karena harga komoditas yang tertekan oleh mekanisme pasar, padahal biaya produksinya cukup tinggi. 6) *appropriation via usury* dimana akses perbankan memiliki tingkat bunga yang besar karena mereka terjebak pada rentir karena kesulitan untuk mengakses pada bank resmi karena ketidakadanya jaminan. 7) *peasant taxation* dimana pemerintah seringkali memberlakukan pajak pada beberapa komoditas pertanian.

Problematisasi struktural ini menyebabkan pilihan menjadi petani sudah tidak menjanjikan. Ketidakberuntungan petani masih ditambah lagi dengan mekanisme pasar yang tidak menguntungkan mereka. Ditambah lagi menghadapi perubahan iklim (alam), kemajuan teknologi, dan juga kelembagaan sektor pertanian. Petani selalu ditempatkan pada posisi yang termarginalkan. Belum lagi sistem perdagangan yang muncul selama ini juga tidak berpihak kepada petani, mahalnnya harga pangan tidak saja dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, namun lebih disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi hasil pertanian. Seharusnya pada saat harga pangan mengalami peningkatan maka petani menikmati hasil tersebut, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Yang paling menikmati dari panjangnya rantai distribusi justru para tengkulak (Abebe, Bijman, & Royer, 2016).

Setiap aktor dalam rantai distribusi tentu mengambil keuntungan. Dampaknya adalah peningkatan harga, tidak jarang dalam rantai distribusi tersebut petani dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Petani memperoleh harga yang rendah untuk produknya, sedangkan konsumen menerima harga yang terlalu tinggi. Untuk itu rantai pasok ini juga harus dibenahi oleh pemerintah. Langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan akses terhadap informasi pasar kepada petani, sehingga para petani bisa langsung menjual produknya secara langsung tanpa perantara. Selain itu, peran kelembagaan petani juga harus dibenahi, tidak hanya terbatas pada fungsi produksi saja tetapi peran kelembagaannya juga harus menyasar pada kegiatan pasca panen.



2019



## BAB III

### Problematika Program Perlindungan Sosial

#### 3.1 Kesalahan *Targeting* Program Perlindungan Sosial Merupakan Ancaman Bagi Modal Sosial dan Solidaritas Sosial Di Masyarakat

Masyarakat Indonesia secara tradisional memiliki nilai modal sosial yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong, siskamling, arisan, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai modal sosial sudah mulai berkurang manakala masyarakat semakin modern dan individualistik (Juul, 2010). Kondisi ini berdampak pada ikatan modal sosial yang awalnya dibangun dalam rangka katup penyelamat dalam pertukaran sosial resiprokal harus tergantikan oleh pertukaran yang rasional instrumental (Widegren, 1997). Kondisi ini menyebabkan *safety nets* dari komunitas bertransformasi menjadi menguatnya peran negara dan swasta melalui instrumentasi kebijakan perlindungan sosial (Midgley, 2009).

Instrumentasi kebijakan perlindungan sosial dalam konteks Indonesia belum sepenuhnya menjadikan negara sebagai aktor tunggal. Negara masih menyeimbangkan peran warga negara melalui relasi pasar tenaga kerja dan juga peran keluarga dalam menghadirkan kesejahteraan (Papadopoulos & Roumpakis, 2017). Hal ini nampak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang secara jelas mengintegrasikan program perlindungan sosial multiaktor.



Ketentuan regulasi di atas pada dasarnya merupakan cita-cita kebijakan sosial yang dikembangkan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara. Responsibilitas pemerintah menjadi garda depan dalam membangun sinergi program perlindungan sosial. Pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Diperlukan skala prioritas dan sinergitas program dari sisi kepersertaan, pelayanan dan pembiayaan supaya masing-masing daerah mampu menghadirkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat di wilayahnya.

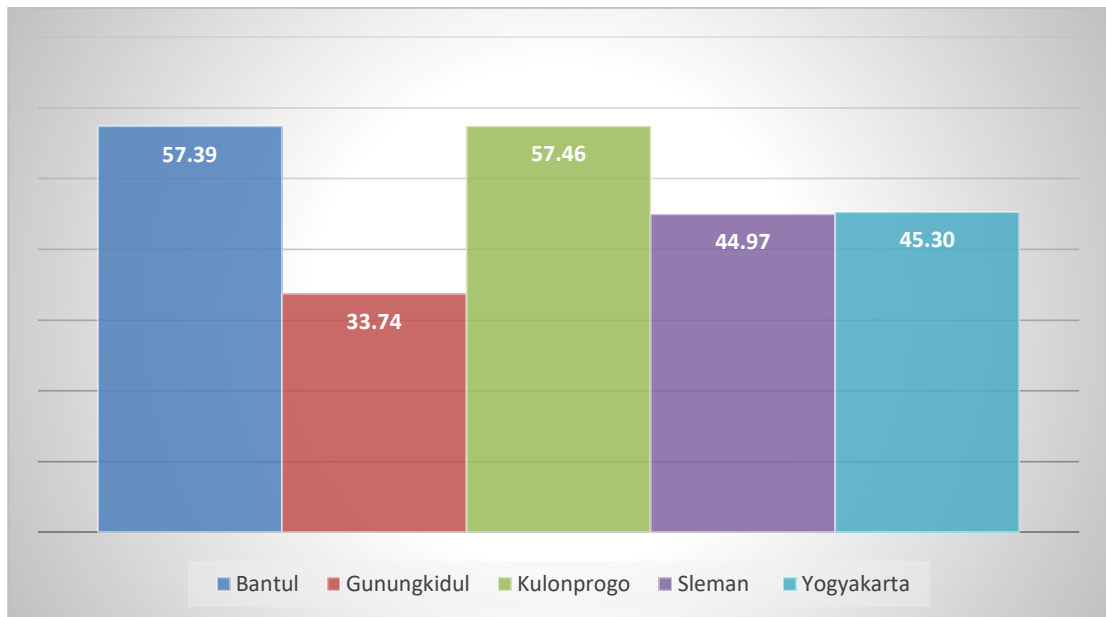
Beberapa orang beranggapan bahwa program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan pemborosan, mahal, yang tentunya berkontradiktif dengan prinsip ekonomi. Namun dalam kenyataannya, keberadaan program perlindungan sosial justru dapat memberikan kontribusi penting bagi pencapaian tujuan bernegara yaitu keadilan sosial, kebebasan individu yang dapat mendukung kedamaian dan keamanan sosial. Selain itu, program perlindungan sosial sangat efektif untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang timbul dari sistem produksi ekonomi swasta. Dan yang paling penting dari keberadaan program perlindungan sosial adalah menciptakan modal manusia untuk meningkatkan produktifitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (von Hauff, 2002).

Parameter kemiskinan merupakan ukuran yang dinamis sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran secara tepat. Program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah seringkali dalam proses penentuan penerima manfaat mengalami *inclusion* dan *exclusion error* (Devereux et al., 2017). Untuk itu perlu updating data secara reguler agar *targeting* penerima program tepat sasaran.

Banyaknya permasalahan terkait proses penjangkauan ini tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan data survei Perubahan Sosial dan Potensi Konflik yang dilakukan oleh PSKK UGM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai kurang tepat sasaran. Hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo menyatakan bahwa program perlindungan sosial memicu potensi konflik di masyarakat (lihat gambar 3.1). meskipun bukan berarti untuk masyarakat di kabupaten yang lain tidak terdapat gejolak.



**Grafik 3.1 Persepsi Masyarakat tentang Potensi Konflik Program Perlindungan Sosial Menurut Kabupaten di DIY**



Sumber : PSKK UGM (2017)

Banyak sekali factor yang menyebabkan proses pengumpulan data dan seleksi data tidak tepat sasaran. Factor tersebut bisa disebabkan dari sisi pembiayaan, politik, dan sosial. Untuk menghasilkan data yang akurat pastinya akan dilakukan melalui proses pendataan yang rumit. Misalkan saja dilakukan sensus yang masing-masing populasi harus didatangi untuk diambil datanya, tentu ini tidak mudah. Dari sisi politik seringkali ketidakakuratan data disebabkan karena adanya intervensi kekuasaan untuk memasukkan atau tidak memasukkan sasaran program atas pertimbangan politis. Sedangkan dari sisi sosial lebih pada persoalan potensi terjadinya konflik atas proses penjaringan tersebut sehingga data secara sadar dimanipulasi agar tidak muncul konflik dikemudian hari.

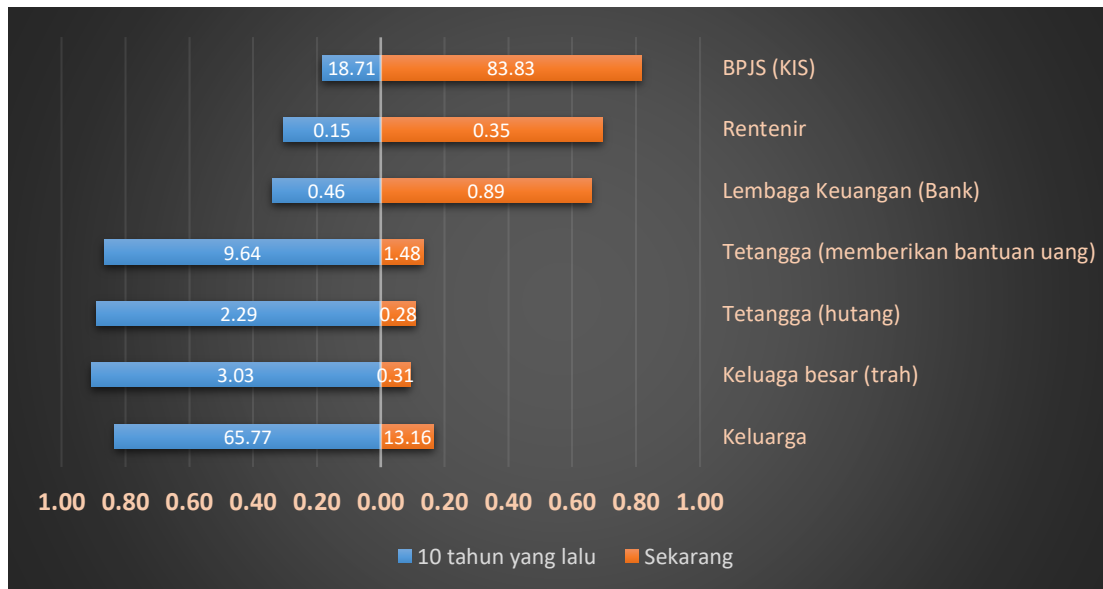
Kegagalan pemerintah dalam implementasi program perlindungan sosial pastinya berdampak buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat merupakan langkah dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Marshall, 1950). Sehingga kesalahan *targeting* menjadi isu pokok yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak melanggar hak-hak dasar tersebut.

Bangunan modal sosial yang cukup kuat pada masyarakat DIY jangan sampai rusak akibat permasalahan program perlindungan sosial yang dalam



implementasinya dinilai banyak persoalan targeting program. Padahal kita tahu sendiri bahwa peran dari komunitas dalam rangka perlindungan sosial masih sangat kuat. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan grafik 3.2 berikut.

**Grafik 3.2 Pihak yang Paling Diandalkan Masyarakat jika Mengalami Kondisi Sakit yang Membutuhkan Biaya Besar**



Sumber: PSKK UGM (2017), diolah

Pihak yang paling diandalkan masyarakat jika mengalami kondisi sakit yang membutuhkan biaya besar sekarang mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu, pihak yang paling diandalkan adalah keluarga besar (trah), disusul oleh tetangga (berupa hutang), tetangga (pemberian bantuan uang), keluarga, lembaga keuangan (bank), rentenir dan terakhir BPJS (KIS). Sementara itu, sekarang pihak yang paling diandalkan masyarakat kurang mampu justru adalah BPJS (KIS) selanjutnya rentenir, lembaga keuangan, keluarga, tetangga (bantuan uang), tetangga (berupa hutang) dan terakhir keluarga besar (trah).

Dari Grafik diatas, menunjukkan bahwasannya program-program bantuan dari pemerintah terutama pada aspek kesehatan sekarang menjadi tumpuan utama bagi masyarakat kurang mampu. Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya pelayanan sosial dasar yang awalnya sangat melekat pada modal sosial yang tumbuh pada masyarakat sudah mulai bergeser pada pemerintah. Meskipun dominasi negara sangat kuat pada aspek pelayanan

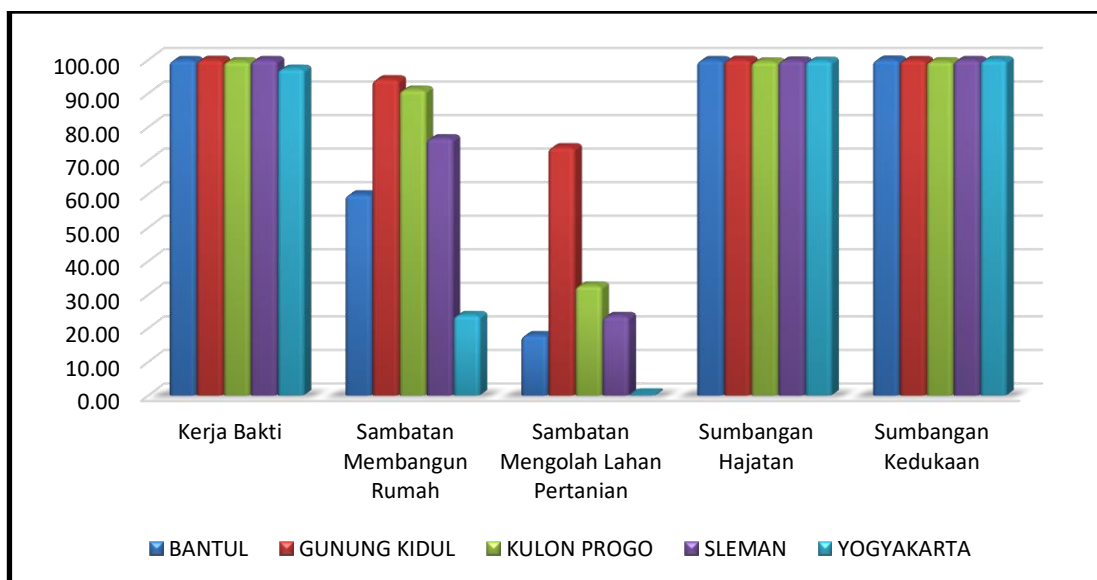




sosial dasar tidak serta merta menggeser peran komunitas dalam membangun *safety nets*.

Sistem sosial yang sejak dahulu ada masih tetap dijadikan tumpuan cara untuk menghadirkan perlindungan sosial. Kegiatan ‘jimpitan’ yang memiliki potensi keuangan yang besar ternyata mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Kegiatan santunan bagi warga yang sakit, santunan kematian, posyandu, PAUD, PKK, dan kegiatan lainnya ternyata ditopang secara finansial oleh kegiatan ‘jimpitan’. Bahkan sistem perlindungan sosial berbasis jimpitan ini sudah terlembagakan secara baik di masyarakat, sehingga pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat munculnya kepercayaan dari masyarakat.

**Grafik 3.3 Kegiatan Sosial yang Masih Berjalan di Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota**



Sumber: PSKK UGM (2017), diolah

Masih kuatnya beberapa kegiatan yang menunjukkan modal sosial yang kuat dapat menjadi modal pembangunan di DIY. Bangunan modal sosial yang kuat tersebut pada umumnya terjadi karena jalinan relasi sosial yang sangat kuat antara satu orang dengan orang lain pada suatu komunitas. Jalinan tersebut yang nantinya akan memberikan keuntungan ekonomi, politik, dan sosial secara resiprokal. Sehingga pendayagunaan atas jalinan relasi tersebut menjadi sangat penting. Pendayagunaan ini juga dimaksudkan untuk berbagi resiko



(risk-sharing) diantara anggota komunitas jika mendapatkan gangguan (Ng, Mirakhor, & Ibrahim, 2015).

Salah satu elemen penting terkait dengan modal sosial adalah kepercayaan diantara anggota komunitas. Kepercayaan yang tumbuh diantara mereka melalui proses yang panjang. Secara individual, kepercayaan tumbuh dan berkembang manakala ekspektasi aktor tertentu menyerahkan sebagian dari tanggungjawabnya kepada aktor yang lain dengan keyakinan bahwa aktor tersebut dapat memegang tanggungjawab dengan sebaik-baiknya (Usman, 2018).

Modal sosial mempunyai peran dan fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat yang nantinya mampu memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Modal sosial juga memiliki peran sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. sehingga modal sosial mampu memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Munculnya disintegrasi sosial disebabkan karena potensi konflik sosial tidak dapat dikelola secara efektif dan optimal, sehingga termanifest dengan kekerasan. Dalam kaitannya dengan program perlindungan sosial, beberapa upaya dilakukan oleh komunitas dalam mendistribusikan kesejahteraan dalam rangka terjaganya integrasi sosial. Istilah 'bagi roto (bagito), bagi adil (bagidil)' muncul dalam praktek distribusi bantuan beras, BLT, dan beberapa program lainnya.

Praktek-praktek tersebut tidak bisa terhindarkan manakala antar masyarakat sudah bersepakat bahwa program bantuan harus didistribusikan seperti itu. Sehingga rasa solidaritas dan rasa kebersamaan harus dikedepankan meskipun itu menyalahi ketentuan yang ada.

Banyaknya program-program jaminan sosial yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa sinergitas untuk menghadirkan kesejahteraan sosial sangat terbuka lebar. Program dari pusat, daerah, bahkan komunitas secara bersama sama hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meringankan beban mereka. Untuk itu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan potensi konflik yang muncul maka program perlindungan sosial utamanya kebijakan pemerintah harus melihat bangunan modal sosial yang ada di masyarakat, jangan sampai dengan hadirnya program jaminan sosial justru malah mematikan modal sosial yang sudah tumbuh ratusan tahun di masyarakat.



### 3.2 Permasalahan Program perlindungan Sosial di Lokasi Penelitian

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan sudah sangat banyak. Desain yang dibuat sampai dengan mekanisme anggarannya sudah disusun sedemikian rupa agar kualitas hidup masyarakat miskin cepat ditingkatkan. Namun pada tataran implementasi di lapangan memiliki banyak sekali tantangan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah parameter atau indikator yang digunakan. Selama ini indikator yang dilakukan lebih pada aspek konsumsi baik konsumsi makanan maupun non makanan yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Padahal indikator tersebut berbeda dan belum tentu kondisinya sama dalam setiap wilayah. Apalagi jika kita kaitkan dengan kondisi DIY yang penyebab kemiskinannya tidak bersifat tunggal, tetapi multidimensional yang saling terkait- sehingga membutuhkan solusi yang tidak bersifat seragam, tetapi kasuistik. Adapun temuan problematika program perlindungan sosial di 16 desa lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

#### **Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo**

Kendala program pengentasan kemiskinan (PK) di desa Hargomulyo adalah: *pertama*, rendahnya *dignity* warga penerima manfaat, warga penerima manfaat tidak merasa malu untuk selalu dibantu. Disisi lain memicu perilaku masyarakat yang pura-pura menjadi orang miskin agar mendapat bantuan, karena menurut masyarakat pemberian bantuan sangat banyak. Dengan kondisi tersebut desa fokus memberikan motivasi kepada penerima PKH untuk mencapai graduasi mandiri dan bersedia melepas PKH-nya, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan melalui program UMKM. *Kedua*, menyempitnya wilayah pertanian dan perkebunan seiring dengan pembangunan bandara. Lahan pertanian sudah mulai dijual oleh masyarakat untuk dibangun gedung, serta tanah kas desa yang rencananya akan dikelola kelompok tani untuk menanam pisang terancam akan dikeruk bandara.

#### **Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo**

Kendala program pengentasan kemiskinan (PK) di desa Hargorejo adalah: *pertama*, pola pikir masyarakat untuk menuju masa depan belum ada. *Kedua*,



tingkat ketergantungan warga terhadap program bantuan juga semakin tinggi. Masyarakat hidup dengan mengandalkan bantuan, tetapi tidak disertai dengan rencana maju ke depan. *Ketiga*, program pemberdayaan bersifat parsial. Selain sikap masyarakat yang kurang bersemangat -kebiasaan program pelatihan diberikan sebatas pelatihan saja memuat masyarakat berhenti setelah program pelatihan selesai. *Keempat*, gaya hidup masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. *Kelima*, penentuan penerima program pemberdayaan dilakukan oleh dusun, dan orang-orang yang diikutsertakan cenderung orang yang sama, yaitu orang yang pro dengan program desa- sehingga pemberdayaan tidak menyentuh warga miskin secara keseluruhan.

### **Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo**

Kendala program pengentasan kemiskinan (PK) di desa Hargotirto adalah: *pertama*, tingkat ketergantungan warga terhadap program bantuan semakin tinggi dan warga penerima manfaat tidak merasa malu untuk selalu dibantu, bahkan memiliki kecenderungan ingin agar terus selalu dibantu, sehingga semangat untuk bekerja menjadi berkurang. Mengingat potensi di desa cukup menunjang jika mau diolah dan dikembangkan, akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan bantuan. Sejauh ini, solusi yang diberikan desa adalah dengan pembinaan melalui kegiatan arisan bagi peserta PKH. *Kedua*, pelatihan yang diberikan selesai ketika kegiatan pelatihan selesai. Menurut kepala desa dan TKPKD hal ini disebabkan karakteristik warga Hargotirto tidak akan bergerak sebelum contoh yang berhasil. Misalnya, penyuluhan pembuatan pupuk organik kepada masyarakat cenderung hanya sampai pada penyuluhan. Tetapi, ketika ada yang berhasil dan laku, warga baru mau bergerak. *Ketiga*, anggaran minim namun yang disasar sangat banyak, sehingga mau tidak mau akan dipilah-pilah program mana yang memiliki landasan paling kuat. *Keempat*, kondisi geografis, beberapa wilayah memiliki akses jalan yang sulit. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mendapatkan sinyal ketika penyaluran BPNT, sehingga penyaluran sering berpindah tempat untuk mencari sinyal. *Kelima*, data, banyak data yang tidak sesuai. *Keenam*, pengertian dan pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda. Misalnya, dilihat dari kondisi rumah nampak bagus sehingga tidak masuk dalam warga miskin, tapi ketika didalami ke hal yang lainnya, ternyata dia membangun rumahnya dengan cara berhutang (atau misal warisan) dan tidak punya penghasilan lain selain penderes. Namun, ada juga warga yang kondisi



rumahnya biasa saja, namun dia memiliki investasi sedemikian rupa di luar kota.

### **Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo**

Kendala dalam pelaksanaan program kemiskinan: *pertama, mindset* masyarakat untuk hidup maju masih belum ada. Hal ini berdampak ketika ada pelatihan, hampir semua penerima bantuan pemberdayaan berhenti setelah pelatihan, walaupun ada bantuan kelompok jarang bisa bertahan lama. Padahal, jika dilihat dari potensi yang dimiliki desa Kalirejo kaya akan SDA, desa sendiri juga selalu memberikan dukungan kepada kelompok yang ingin mengembangkan atau memiliki rencana dalam pengembangan potensi desa. *Kedua*, minimnya tanggung jawab masyarakat. Hal ini bisa dilihat ketika warga yang mendapatkan pinjaman modal dari desa, dapat mengembalikan pinjaman tersebut ke desa. Kondisi tersebut disebabkan karena karakteristik warga yang minim tanggung jawab dan ada juga yang benar-benar miskin.

### **Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul**

Desa Selopamioro merupakan satu-satunya desa budaya yang ada di Kecamatan Imogiri. Potensi budaya yang diiringi dengan perkembangan wisata membuat desa ini memiliki *master plan* tata ruang desa sebagai desa wisata, budaya dan edukasi. Desa ini dalam mempercepat pengentasan kemiskinan memiliki aturan yang disahkan atas keputusan kepala desa: *pertama*, no. 17 tahun 2018 tentang peningkatan fasilitas bagi anak yatim dan miskin, program ini berupa bantuan alat-alat sekolah setiap satu tahun sekali. *Kedua*, no 18 tahun 2018 tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan PAUD dan TK Desa, kegiatan ini bertujuan membantu merubah pola pikir masyarakat yang secara budaya masih memiliki pemikiran bahwa Pendidikan formal kurang penting. *Ketiga*, no 19 tahun 2018 tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Yandu Balita dan Lansia, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan makanan tambahan kepada lansia dan balita. Selain itu di dukuh Kalidadap dan Kedungjati tercatat balita banyak yang mengalami stunting.

Program-program penanggulangan kemiskinan mengarah kepada tiga komponen yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan dan keamanan. Secara garis umum permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat



diantaranya: *Pertama*, pengertian dan pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda-beda. *Kedua*, minimnya data dan informasi kemiskinan dalam perencanaan program pembangunan. *Ketiga*, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, dalam beberapa kasus, program bantuan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah justru menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan. *Kelima*, budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa kemiskinan adalah takdir, sehingga mereka sulit terlepas dari kemiskinan. *Keenam*, kurang pede dalam meningkatkan kemampuan serta mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada disekitarnya.

Menurut informan, tipologi masyarakat desa Selopamioro masih erat dengan filosofi Jawa "*Nrimo ing Pangdum*"—menerima keadaan yang diberikan Tuhan ataupun makhluk dengan berlapang dada, sabar dan usaha yang kemudian dipahami masyarakat sebagai penerimaan keadaan tanpa adanya usaha lebih, meskipun jika dilihat dari kualitas masyarakat tentang ketrampilan membuat olahan makanan, membatik, bertani dan beternak tidaklah buruk. Namun, secara personal mereka merasa tidak pede untuk bersaing lebih luas lagi.

### **Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul**

Program pengentasan kemiskinan desa Sriharjo lebih menekankan kepada pengembangan sumber daya manusia, hal tersebut sebagai penyeimbang pembangunan fisik. Diantara program-program tersebut adalah pelatihan *skill* untuk remaja, keluarga difabel dan ibu-ibu. Akan tetapi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya: *pertama*, tingkat perceraian di desa Sriharjo cukup tinggi, sehingga pemberdayaan kepada kepala keluarga perempuan perlu diperhatikan lebih serius. Dalam hal ini, termasuk pemberdayaan keluarga disabilitas.

*Kedua*, banyaknya mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian, perlu peningkatan sarana dan prasarana pertanian, selain itu kelompok atau organisasi tani perlu pendampingan serta pelatihan pengembangan bagaimana petani mampu *packaging* produk serta pemasaran hasil pertanian tersebut. Karena dengan adanya pendampingan yang baik, masyarakat bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Ketiga*, penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun



upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sectoral dan belum komprehensif. Seperti program pelatihan-pelatihan yang diberikan, sejauh ini hanya seputar pertemuan satu hingga tiga hari, kemudian tidak diberikan modal. Sehingga masyarakat miskin kesulitan untuk menerapkannya.

Menurut informan, program pengentasan kemiskinan dari pusat hingga desa sudah sangat banyak, akan tetapi jika masyarakat sendiri tidak dirubah cara berfikirnya, bantuan tunai yang diberikan tersebut akan terus menimbulkan konflik tersendiri di masyarakat.

### **Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul**

Pasar Jolontoro berada di wilayah desa Wukirsari yang dibangun untuk membersihkan sungai, menarik wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan berjualan makanan tradisional. Mengenai program pengentasan kemiskinan Desa Wukirsari memiliki beraneka ragam program, diantara permasalahan dalam pelaksanaan program adalah: *pertama*, pengertian dan pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda-beda. *Kedua*, pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sectoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan sehingga program belum optimal. *Ketiga*, penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah, dalam beberapa kasus, bantuan tunai justru menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan. Akibatnya, rendahnya *dignity* warga penerima manfaat, warga penerima manfaat tidak merasa malu untuk selalu dibantu dan berharap menerima bantuan selamanya. *Keempat*, personality pendamping yang kurang berjiwa sosial, sehingga pendampingan tidak hanya bertujuan mengawasi program namun juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan tunai tidak bersifat selamanya, namun sementara. Selain itu, masa pendampingan yang cukup singkat, bahkan terkadang program-program pemberdayaan tidak ada pendampingan, menjadikan program belum maksimal. *Kelima*, bantuan RTLH menganjurkan warga memiliki bukti atas kepemilikan tanah dan swadaya yang cukup.

Menurut informan, program pemberdayaan dan bantuan tunai perlu adanya pendampingan yang intens serta personality yang memadai, karena tanpa adanya proses tersebut program apapun yang diberikan akan kurang





maksimal, terutama bantuan permodalan KUBE- sejauh ini bantuan tersebut yang paling efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, disbanding dengan program lainnya, meskipun diantara program saling melengkapi.

### **Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul**

Desa Karangtengah memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara proporsional dan memperluas usaha ekonomi secara kemitraan. Pengembangan ekonomi pedesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Selain soal ekonomi bantuan mengenai pengentasan kemiskinan juga mencakup bantuan tunai. Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami di lapangan adalah: *Pertama*, pengertian dan pengukuran yang digunakan, akan menentukan pilihan program penanggulangan kemiskinan, namun indikator dari “kemiskinan” tidaklah sama dan minimnya ketersediaan data serta informasi kemiskinan yang digunakan dalam perencanaan program bantuan. *Kedua*, kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga perlu kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, minimnya koordinasi antara para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan. *Keempat*, minimnya dana bantuan yang tidak di support program lain, sehingga program tidak maksimal. Misalkan, pelatihan ketrampilan tanpa support dana dan pendampingan hanya akan berlalu begitu saja.

Menurut informan data penerima bantuan masih banyak yang tidak sesuai dengan sasaran, nama penerima yang masuk dalam BDT adalah warga yang memiliki aset perkebunan kayu, *rojo koyo* dan rumah di daerah lain, meskipun kondisi rumah yang ditempati di desa Karangtengah kondisinya sangat sederhana. Sedangkan warga yang benar-benar miskin tanpa aset terkadang tidak masuk BDT.

### **Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul**

Kendala program bantuan pengentasan kemiskinan: *pertama*, data, indikator kemiskinan yang berbeda membuat data kemiskinan tidak sama. Menurut informan indikator kemiskinan desa di Kec. Panggang berbeda-beda, misalnya saja desa Giriharjo menyebutkan bahwa warga miskin adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 1 juta. Selain itu persoalan data juga memberikan





dampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat desa, terutama masyarakat yang mengetahui jumlah penerima bantuan di desa sebelahnya jauh lebih banyak dibanding desa dimana mereka tinggal. *Kedua*, meningkatnya konflik vertikal dan konflik horizontal di lingkungan masyarakat penerima program. Kasus ini sering ditemui dalam kerja bakti - kecemburuan sosial diantara masyarakat membuat mengikis tradisi gotong royong yang sudah menjadi tatanan masyarakat sejak dahulu. *Ketiga*, masyarakat dinina bobokkan dengan bantuan, sehingga ketergantungan terhadap program semakin tinggi. *Keempat*, pola pikir masyarakat yang susah dirubah, hal ini menyebabkan *dignity* warga penerima manfaat rendah-warga penerima manfaat tidak merasa malu untuk selalu dibantu, bahkan ingin agar terus selalu dibantu. *Kelima*, penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah, *Keenam*, penanggulangan kemiskinan harusnya persoalan lintas bidang pembangunan, namun dalam realitanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat sektoral dan belum komprehensif.

#### **Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul**

Kendala program pengentasan kemiskinan (PK) di desa Girikarto adalah: *pertama*, anggaran yang diperuntukkan untuk program PK sedikit, sedangkan memiliki cakupan yang banyak. *Kedua*, data-- warga miskin masih banyak yang belum masuk BDT, sehingga belum mendapatkan program. Selain itu, data kemiskinan memiliki pengertian dan pengukuran yang berbeda di beberapa instansi, sehingga perlu adanya data kemiskinan yang keluar dari satu pintu. *Ketika*, kecemburuan sosial di masyarakat antara masyarakat bukan penerima dan penerima manfaat, perasaan iri demikian menjadikan pemicu konflik vertikal dan horizontal di lingkungan masyarakat penerima program.

#### **Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul**

Kendala program pengentasan kemiskinan (PK) di desa Girimulyo adalah: *pertama*, data-- pengertian dan pengukuran yang berbeda serta minimnya ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang digunakan dalam perencanaan program pembangunan. Sebab data terus berubah, dalam realitanya masih banyak warga miskin yang belum masuk BDT, terutama KK baru. *Kedua*, memunculkan konflik vertikal dan horizontal di lingkungan



masyarakat penerima program-sebab adanya kecemburuan sosial diantara warga. *Ketiga*, program PK menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan, hal ini terjadi karena dalam pemahaman masyarakat- PK merupakan tanggung jawab pemerintah secara mutlak.

### **Desa Girisekar Kecamatan panggang Kabupaten Gunungkidul**

Kendala program penanggulangan kemiskinan (PK) di desa Girisekar adalah: *Pertama*, data- pengertian dan pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda, sedangkan data PK digunakan untuk menentukan pilihan program PK. *Kedua*, ketergantungan warga penerima program terhadap bantuan semakin tinggi. *Ketiga*, penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. *Keempat*, program bantuan masih bersifat parsial, sesungguhnya PK merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun sejauh ini masih bersifat sectoral. Sehingga dalam realitanya, program-program bantuan pemberdayaan berjalan hanya sebatas pelatihan tanpa adanya keberlanjutan semisal -modal, pendampingan, monitoring, *update skill*—yang menjadikan paket komplut untuk penerima manfaat hingga benar-benar mandiri.

### **Desa Banyurejo Kecamatan Tempel kabupaten Sleman**

Kendala program penanggulangan kemiskinan (PK) di desa Banyurejo adalah: *pertama*, memunculkan konflik horizontal dan vertical di lingkungan masyarakat penerima program. Selain kecemburuan sosial, dalam kasus penetapan seseorang itu dianggap miskin atau tidak menjadi perdebatan di desa, karena indikator kemiskinan berbeda. Misalnya, kecenderungan dusun yang pilih-pilih dalam mencoret warga mampu di dari data penerima manfaat, karena dianggap telah memiliki kendaraan motor roda dua, tanpa memperdulikan pengeluaran, melihat kondisi rumah dan lain sebagainya. adanya konflik demikian di desa Banyurejo, aparat desa membentuk TIM verifikasi yang saklek (orang-orang yang akan menilai sesuai indikator yang dibuat desa). *Kedua*, kesulitan dalam mencari peserta pelatihan. Pelatihan menjahit dari BLK mencari yang usia produktif, sedangkan di Banyurejo sebagian besar warga miskin merupakan warga lanjut usia. *Ketiga*, pelatihan yang diberikan tidak berdasarkan kebutuhan pasar atau tidak disesuaikan pasar lokal dan sebatas pelatihan, tanpa memberikan modal serta bantuan



pemasaran. Seperti pengolahan sampah dibuat kerajinan seperti tas, tapi tidak ada pembeli-karena tidak tahu pasar.

### **Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman**

Kendala program penanggulangan kemiskinan (PK) di desa Lumbungrejo adalah: *Pertama*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lumbungrejo didominasi pembangunan infrastruktur fisik, yakni sebesar 60% dan 40% untuk non fisik. *Kedua*, kurangnya kordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut informan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjukkan perhatiannya dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Desa Lumbungrejo, yakni dengan hadirnya TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). Namun, kehadiran TKSK tidak serta merta memberi dampak yang signifikan karena kurangnya koordinasi dengan aparaturnya dan masyarakat desa dalam melahirkan inovasi program pengentasan kemiskinan. *Kedua*, BUMDEs yang belum berjalan dalam menggerakkan roda perekonomian desa.

### **Desa Merdikorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman**

Kendala program penanggulangan kemiskinan (PK) di desa Merdikorejo adalah: *pertama*, mekanisme kerja sama yang kurang baik antara pemerintah pusat hingga desa dan hal ini menyebabkan minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberadaan pendamping desa dan Tim teknis lainnya nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan di desa Merdikorejo. *Kedua*, pola pikir dan budaya masyarakat yang belum memiliki daya juang menjadi penyebab sulitnya mengatasi kemiskinan di Desa Merdikorejo. Masyarakat cenderung tidak malu dianggap miskin untuk mendapatkan bantuan dan memiliki ketergantungan kepada bantuan semakin tinggi. *Ketiga*, penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah, dalam beberapa kasus program PK justru menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.

### **Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman**



Kendala program penanggulangan kemiskinan (PK) di desa Pondokrejo adalah: *pertama*, data- data dalam BDT tidak tepat sasaran, masih banyak ditemukan *inclusion error*. Minimnya ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang digunakan dalam perencanaan program pembangunan menyebabkan program yang masuk dalam masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran. *Kedua*, masyarakat tidak merasa malu untuk mengaku miskin demi mendapat bantuan, sebab dalam pemahaman masyarakat program PK dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran. *Ketiga*, TPK kurang berjalan sebagaimana mestinya.



## **BAB IV**

### **Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Desa Menjadi Solusi Penurunan Kemiskinan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi angin segar bagi masyarakat desa untuk bisa mengungkit keteringgalannya dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa sering diidentikkan dengan masyarakat yang bodoh, miskin, tidak berdaya, dan streatif lainnya. Daya ungkit yang bisa menggerakkan masyarakat desa untuk maju sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap desa terkait dengan kewenangan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas (Silahuddin, 2015).

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ke-dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya (M Zulkarnaen, 2016). Pengakuan atas asas ini sangat penting bagi perubahan situasi sosial di desa karena mampu menciptakan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan desa. Selain itu, implikasi lain dari lahirnya undang-undang tersebut adalah adanya sejumlah dana yang masuk ke desa yang disebut dengan Dana Desa (DD) (Republik Indonesia, 2014).

Pada hakikatnya tujuan dari pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 78 (1) UU Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan". Untuk itu, melalui dukungan DD membuka kesempatan bagi desa untuk meningkatkan



perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa. Arah pembangunan perdesaan seperti itulah yang nantinya mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah antara desa dan kota (Hadna et al., 2017).

Guna memaksimalkan penggunaan DD, setiap tahun Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) mengeluarkan peraturan terkait dengan prioritas penggunaan DD. Berdasarkan PermendesPDTT Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dinyatakan bahwa pembangunan sarana prasarana ekonomi desa bertujuan untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi: (a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, (b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, (c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

#### **4.1 Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan**

Pembangunan ekonomi pedesaan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan dari pelaksanaan UU Desa. Guna menciptakan keinginan tersebut maka agenda prioritas yang harus dilakukan adalah adanya desain pengembangan ekonomi desa yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pemaknaan terhadap pembangunan desa harus bertumbu pada skala prioritas dan potensi desa yang pro terhadap masyarakat rentan.

Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan pilihan untuk mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang pada gilirannya nanti akan juga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Desain pengembangan ekonomi kerakyatan pada dasarnya menempatkan rakyat dalam penguasaan atas tanah, sumber daya alam, permodalan, dan proses produksi. Adapun langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah dengan revitalisasi pertanian, pengembangan kawasan ekonomi yang menekankan pada pengembangan produk unggulan, penataan aspek kelembagaan pertanian, termasuk juga aspek tata niaga sektor pertanian.



Pengembangan usaha mikro (UMKM) juga harus menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi desa. Keperpihkan terhadap pembangunan UMKM penting dilakukan karena UMKM terbukti tangguh untuk menghadapi krisis ekonomi utamanya resesi global (Nurcaya, 2019). Padahal kita tahu sendiri, bahwa UMKM mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan menyerap tenaga kerja yang banyak, utamanya kelompok perempuan (Fauzi, 2018).

Arah pengembangan ekonomi desa diharapkan juga menyasar pada pengembangan kluster ekonomi kawasan perdesaan. Hal ini penting dilakukan agar wilayah tersebut memiliki kekuatan dalam pengembangan produk-produk unggulan. Selain pada aspek kesamaan ekosistem, kekuatan dari sisi SDM, sumber daya alam, termasuk juga modal sosial dan kultural juga dapat dikapitalisasi untuk pengembangan ekonomi bersama. Kuncinya adalah adanya sinergitas dari sisi perencanaan. Peran pemerintah supra desa menjadi sangat penting dalam hal ini.

Pengembangaa kluster ekonomi berbasis produk unggulan penting dikembangkan pada sektor pertanian. Para petani seringkali merasa rugi karena produk yang dihasilkan sangat melimpah akibat tidak adanya informasi terhadap produk. Kedepan yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan sinergitas petani perlu dilakukan dengan langkah kongkrit seperti membuat pasar lelang hasil pertanian. Dengan adanya pasar lelang ini, maka petani dapat mengendalikan harga sesuai dengan keputusannya sendiri, termasuk juga dapat menekan permainan para tengkulak.

Sinergitas dalam mewujudkan kluster ekonomi kawasan perdesaan merupakan agenda kedepan yang harus dilakukan guna memperkuat rantai ekonomi. Tidak semua desa memiliki kemampuan untuk menciptakan produk unggulan mulai dari awal hingga akhir. Untuk itu desain kawasan perdesaan juga harus mampu disinergikan untuk *supply chain management*. Ada desa yang di desain untuk menghasilkan produk bahan mentah, ada desa yang di desain untuk menghasilkan barang jadi. Sehingga persangainan yang tidak sehat dapat dihindari karena pada umumnya mereka akan menekan kualitas agar dapat bersaing dengan daerah lain.

Selain itu, kerjasama antar desa juga dapat dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan untuk keberlanjutan ekonomi. Sebagai contoh, misalkan sebuah desa di wilayah pesisir yang memiliki produk unggulan



perikanan, maka limbah hasil olahan ikan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang nantinya dapat digunakan oleh para petani di kawasan pertanian. Skema kerjasama ini menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah supra desa dalam rangka meng-*link*-kan kebutuhan yang ada di desa dengan desa yang lain.

#### **4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Desa**

Upaya yang dilakukan oleh Kemendesa PDT guna pengembangan ekonomi desa diwadahi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini mulai banyak berdiri di seluruh desa di Indonesia (Zuraya, 2018). BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif di desa (Putra, 2015). BUMDes memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi kerakyatan terutama sektor pertanian yang banyak digeluti oleh masyarakat desa. Peran strategis BUMDes dalam usaha pertanian bisa menjadi mitra petani dalam sistem pertanian terpadu. Konsep ini biasa dinamakan dengan korporasi pertanian (Cook, 1995).

Tujuan utama kehadiran BUMDes adalah menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes merupakan sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Tarmidzi dan Arismiyati, 2018). Atas dasar itulah secara pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa (Prasetyo, 2017). Kehadiran BUMDes di desa merupakan wujud dari kemandirian sebuah desa, karena dengan hadirnya BUMDes, desa mampu mengkapitalisasi asset dan potensinya demi peningkatan pendapatan desa dan juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Kurniawan, 2015). Cara kerja BUMDes dapat dilakukan dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Arah tujuan dan visi besar tersebut meneguhkan konsep tradisi berdesa yang merupakan salah satu gagasan fundamental dalam mengiringi jalannya BUMDes (Putra, 2015). Tradisi Berdesa akan sejalan dengan kekayaan modal





social, modal ekonomi dan modal politik yang ada di desa. Dengan kekayaan modal tersebut diharapkan BUMDes memiliki daya tahan demi keberlanjutan BUMDes (Putra, 2015).

Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUMDes adalah: pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, komunikasi) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. Kedua, BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUMDes. Ketiga, BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi (Eko et al., 2014).

Semangat yang harus ditumbuhkan dalam pengelolaan BUMDes adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (modal social). BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa (Putra, 2015). Modal sosial menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh desa dalam mendirikan BUMDes. Karena modal social merupakan modal yang paling produktif dalam mencapai sebuah tujuan bersama (Putnam, 1993). Tradisi berdesa sudah sangat lekat dengan bangunan modal socialnya. Sehingga dengan modal social tersebut bisa dengan mudah untuk menggerakkan dimensi ekonomi yang ada di masyarakat (Doh & Mcneely, 2012).

Kerjasama yang dibangun antara petani dan BUMDes haruslah tidak mengedepankan *profit oriented* melainkan lebih pada peningkatan *benefit* kepada masyarakat luas, dalam hal ini petani. Orientasi ini harus tertanam dalam benak para pengambil kebijakan yang ada di desa, sehingga arah dan tujuan dari pendirian BUMDes benar-benar mampu memberdayakan masyarakat banyak.

Manajemen yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya menerapkan konsep manajemen rantai nilai (Value Chain Management/VCM). Karakteristik dasar dari rantai nilai adalah kerjasama yang berorientasi pasar, di mana unit usaha yang berbeda saling bekerja sama untuk memproduksi dan memasarkan produk dan jasa dengan efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2015). Petani sebagai produsen komoditas pertanian hanya perlu memikirkan bagaimana menghasilkan komoditas yang baik yang berorientasi pada mutu produk,

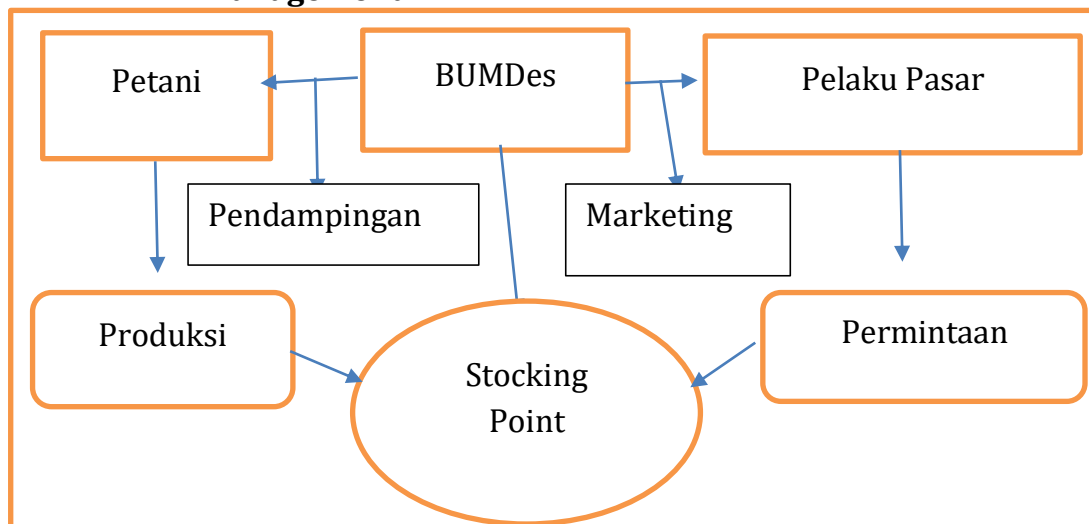


mereka tidak perlu memikirkan bagaimana pemasarannya pasca panen, apakah bisa terserap pasar atau tidak. Dengan manajemen VCM peran BUMDeslah yang akan menghubungkan antara produsen dan pelaku pasar, termasuk juga manajemen logistiknya.

Sistem seperti ini memerlukan intervensi pasar secara ketat dimana permintaan terhadap komoditas harus sesuai dengan penawarannya. Terjadinya kelebihan dan kekurangan produk merupakan indikasi kegagalan pasar. Kelebihan produk berakibat harga produk atau komoditas menurun, sementara kekurangan produk akan berdampak pada kenaikan harga. Karenanya, peran BUMDes sebagai pengendali harga harus memastikan berapa kebutuhan akan komoditas yang dibutuhkan pelaku pasar harus disesuaikan dengan jumlah petani yang akan menanam komoditas tersebut. Manajemen rantai nilai dalam sector pertanian ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan keuntungan persaingan (*competitive advantage*) (Bank Indonesia, 2015).

Intervensi yang dilakukan oleh BUMDes mulai dari pemberian bantuan permodalan, melakukan pendampingan kepada petani agar tidak mengalami gagal panen, serta memastikan jaminan pemasaran melalui *stocking point* pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan akan muncul. Karena dalam manajemen VCM kegagalan dalam satu rantai nilai akan berakibat pada rantai-rantai yang lain, yang itu berarti kerugian secara menyeluruh dari keseluruhan rantai nilai (Wang, Lan, & Chu, 2013).

**Gambar 4.1 Relasi Petani dan Bumdes Dalam Mekanisme Supply Chain Management**



Sumber : Data Primer



Guna menghindari kegagalan, maka dibutuhkan sinergitas bersama dari semua elemen yang terlibat dalam rantai nilai baik itu dari sisi sumberdaya manusianya maupun pada penguasaan teknologi agar resiko yang akan ditimbulkan bisa sejak dini diminimalisir (Ritchie et al., 2008). Untuk itu peran komunikasi yang intensif antar semua rantai nilai harus dibangun secara baik, agar permasalahan yang ada di salah satu rantai nilai bisa diketahui oleh yang lain.

#### **4.3 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Harus Berkontribusi Pada Penurunan Kemiskinan**

Daya tarik DIY yang memiliki akar budaya yang kuat dengan pola kehidupan masyarakatnya yang aman dan nyaman, serta keramahatamahannya telah menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di DIY. Peningkatan jumlah wisatawan yang pesat tersebut sejalan dengan arah pembangunan kepariwisataan DIY yang diatur dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) DIY Tahun 2012-2025. Dalam pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa “Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat”.

Pengembangan pariwisata DIY saat ini lebih berfokus pada peningkatan PAD yang bersumber dari privat sektor. Hal ini terlihat dari pendapatan agregat Penerimaan Asli Daerah Provinsi DIY (Tabel 1) dari sektor Pariwisata pada tahun 2017 yang 78,98 % didominasi penerimaan dari pajak hotel dan restoran. Pajak dari hotel dan restoran cenderung tinggi sebagai sumber penerimaan PAD di Kota Yogyakarta (92,19 % dari total 186 miliar rupiah) dan Kabupaten Sleman (85,55 % dari total 180 miliar rupiah). Berbeda dengan ketiga kabupaten lainnya dengan total PAD pariwisata yang cenderung sangat kecil dengan dominasi retribusi obyek dan daya tarik wisata yakni Kab. Bantul (96,15 % dari total 17 miliar rupiah), Kab. Kulon Progo (76,27 % dari total 5 miliar rupiah), Kab. Gunung Kidul (79,12 % dari total 32 miliar rupiah). Perbedaan gap PAD antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten sleman dengan Ketiga Kabupaten lainnya, dapat terindikasi dari wisatawan yang datang mengunjungi ketiga kabupaten tersebut pada



umumnya memilih menginap dan tinggal di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gap kewilayahan atas keterbatasan akomodasi menjadikan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul tidak maksimal.

**Tabel 4.1 PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sektor Pariwisata tahun 2017**

Wilayah	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Tontonan/Hiburan	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda	Persentase Total PAD Sektor Pariwisata	Total PAD (rupiah)
Kota Yogyakarta	92,19	7,34	-	0,47	100,00	186.241.789.463
Kab. Sleman	85,55	9,57	4,27	0,60	100,00	180.915.056.184
Kab. Bantul	0,06	3,74	96,15	0,05	100,00	17.774.915.394
Kab. Kulonprogo	31,98	0,29	67,27	0,45	100,00	5.323.723.984
Kab. Gunung Kidul	18,07	0,36	79,12	2,44	100,00	32.758.748.570
<b>Total Provinsi DIY</b>	<b>78,98</b>	<b>7,51</b>	<b>12,84</b>	<b>0,66</b>	<b>100,00</b>	<b>423.014.233.595</b>

Sumber: Data Statistik Kepariwisata Provinsi DIY (2017), diolah

Sangat penting pembangunan Pariwisata di masing-masing Wilayah Kabupaten diarahkan pada pengembangan pariwisata yang lebih mengintegrasikan komunitas masyarakat dalam mata rantai pengembangan ekonomi pariwisata. Pengintegrasian komunitas masyarakat seharusnya bukan hanya pada aspek pengelolaan seperti pekerja di lokasi obyek pariwisata, namun mereka terlibat dalam skema langsung integrasi pariwisata berbasis masyarakat atau *integrated community based tourism (ICBT)* seperti penyedia homestay, layanan jasa catering, penampilan seni dan budaya, pemasaran, dll. ICBT yang diterapkan tentunya menyesuaikan ekosistem dan otentifikasi budaya masyarakat setempat. Dalam ICBT, selain wisatawan menikmati obyek wisata yang disediakan, namun juga melebur dengan amenities, aksesibilitas dan atraksi yang ada dimasyarakat. Lama tinggal rata-rata wisatawan yang hanya 2 hari di DIY tentu dapat meningkat dengan praktik ICBT.

Arah pengembangan ICBT haruslah mengedepankan pada otentisitas kultural yang ada di DIY. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi wisata yang ada diwilayahnya yang itu harus dikaitkan pada aspek kultural yang ada di masyarakat. Nilai jual inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mau berkunjung ke lokasi tersebut. Selama ini, aspek otentisitas belum ditonjolkan



secara utuh. Guna bisa menampilkan otentisitas kultural DIY maka yang harus dibutuhkan adalah masyarakat yang sadar wisata.

Hadirnya industri pariwisata di DIY harus dimaknai sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemberian akses kerja yang layak bagi semua orang. Pendekatan ini menekankan pada aspek manfaat dari industri pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pola pembangunan pariwisata yang seperti ini membutuhkan pendekatan yang holistik. Hadirnya industri pariwisata dan industri penunjang pariwisata harus dimaknai sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Secara ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi DIY dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai investasi yang masuk ke DIY. Nilai investasi selama triwulan II 2018 total investasinya sebesar 197,28 milyar yang terdiri dari 163,34 milyar investasi dalam negeri dan 33,94 milyar investasi luar negeri. Hotel dan restoran yang merupakan sarana utama penunjang aktivitas pariwisata masih menjadi daya tarik investasi bagi para investor dalam negeri dengan jumlah persentase sebesar 73,98 persen dari total investasi. Sedangkan bagi investor luar negeri, hotel dan restoran relative lebih kecil dengan jumlah persentase hanya 24,27 persen (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional DIY, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut kurang bisa memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan yang ada di DIY. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di DIY sebesar 13,34 persen sedikit mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 13,02 persen (BPS, 2018). Stagnansi penurunan kemiskinan tersebut memperjelas bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY belum inklusif.

Investasi industri pariwisata yang dalam hal ini lebih banyak berupa hotel dan restoran harus dimaknai sebagai sebuah cara untuk penurunan kemiskinan. Menjamurnya perhotelan dan restoran yang ada di DIY haruslah dimaknai sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Pola seperti ini tidak dimaknai sebagai anti modal dari swasta, melainkan modal yang ramah kepada masyarakat (Ardika, 2018).

Guna menciptakan pembangunan ekonomi kerakyatan, maka masyarakat harus dilibatkan secara luas dalam rantai pasok industri pariwisata (*suplay*



*chain management*) yang dalam hal ini menjadi rantai pasok hotel dan restoran. Peran Pemda DIY mutlak diperlukan untuk mengatur regulasi tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar bisa masuk menjadi rantai pasok industri pariwisata. Misalkan, setiap hotel yang ada di DIY untuk memenuhi kebutuhan laundry-nya harus melibatkan masyarakat sekitar, kebutuhan akan sayuran dan makanan lainnya juga harus melibatkan masyarakat. Sehingga kehadiran hotel dan restoran bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Konsep yang bisa dikembangkan adalah pembangunan ekonomi berbasis komunitas (*community based economic development/CBED*). Pola pengembangan seperti ini harus dilandasi atas kesadaran mengenai *mutual trust* dan *mutual benefits* semua pihak. Konsep CBED pada dasarnya merupakan gabungan dari *Community Development* yang terkonsentrasi pada membangun modal sosial melalui pengorganisasian komunitas atau institusi lokal yang ada di masyarakat, sedangkan *Economic Development* akan berkonsentrasi pada penciptaan lingkungan yang kondusif untuk kesempatan ekonomi. CBED dapat menjadi salah satu model pembangunan ekonomi yang terintegratif dalam pembangunan industri pariwisata kedepan. Langkah ini merupakan upaya strategis yang bisa dikembangkan agar jaminan keberlanjutan industri pariwisata tetap terus berlanjut dan tidak meminggirkan masyarakat DIY.



## **BAB V**

### **Agenda Kegiatan *Profiling* Rumah Tangga Miskin dan Penyusunan Desain Pemberdayaan Masyarakat Terintegratif Melalui Community Based Economic Development (CBED)**

#### **5.1 Latar Belakang**

Melihat gambaran hasil penelitian pendahuluan yang sudah dipaparkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, permasalahan kemiskinan yang ada di DIY sangatlah kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang baik di DIY pada dasarnya mampu memberikan peluang untuk peningkatan kesejahteraan secara luas. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dimaknai sebagai langkah yang mampu mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik antar wilayah maupun antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Selain itu, diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Mampu menciptakan dan menambah lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan di DIY.

Problematika kemiskinan tidak sebatas pada parameter yang digunakan, melainkan karakteristik dari rumah tangga miskin itu sendiri juga menjadi faktor penentu. Berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menekan kemiskinan yang ada di DIY. Namun laju penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih belum memuaskan.





Kesulitan dalam penurunan kemiskinan yang ada di DIY bisa jadi disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai penyebab kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan selama ini hanya dilihat dalam satu dimensi saja. Sumber data yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara makro berasal dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (Ras, 2013). Amartya Sen pada tahun 1987 mengkritik pendekatan kemiskinan dengan menggunakan analisis moneter. Menurut Sen, pendekatan tersebut hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan. Menurut Sen, masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*), penghasilan atau konsumsi tapi terdapat dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan (Perkumpulan Prakarsa, 2013).

Untuk itu, perlu adanya terobosan baru dalam rangka memotret kemiskinan yang ada di DIY. Potret kemiskinan ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui karakteristik kemiskinan yang terjadi. Bisa jadi kecenderungan kemiskinan di DIY terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan sosial.

Pendekatan dalam rangka profiling kemiskinan dilakukan dengan memadukan data rumah tangga miskin dengan pemetaan sosial yang ada di wilayah tersebut. Peranan pemetaan sosial dianggap sangat penting dalam melihat program-program sosial, atau berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat lainnya karena pemetaan sosial merupakan suatu instrument realisasi program yang mengedepankan partisipasi. Sementara partisipasi merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya partisipasi ditekankan oleh Uphoff. Dalam suatu studi mengenai peranan partisipasi, Uphoff (1991) menganalisis tiga program pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural community development*). Uphoff menemukan bahwa ketiga program tersebut telah didesain secara inovatif namun perencanaannya mengeleminir partisipasi masyarakat lokal. Melalui pendekatan seperti ini program-program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasa kurang diuntungkan dari realisasi program tersebut. Dalam kondisi seperti ini, program tersebut tidak bisa berjalan secara berkelanjutan.

Kontribusi paling mendasar pemetaan sosial dalam realisasi program perlindungan sosial ataupun juga pemberdayaan masyarakat adalah bahwa pemetaan sosial mampu memberi ruang yang cukup luas bagi pelibatan





masyarakat (*community involvement*). Pemetaan sosial merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kegiatan. Pelibatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian input dalam proses penyusunan program. Melalui kegiatan ini dapat menggali input dari masyarakat mengenai berbagai isu yang terkait dengan realisasi program. Isu tersebut meliputi: program pemberdayaan yang berjalan di masyarakat, masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat, modal social (*social capital*), potensi konflik, dan persepsi masyarakat mengenai program yang relevan.

Data profiling rumah tangga miskin yang dipadukan dengan data pemetaan sosial nantinya akan dijadikan dasar dalam menyusun desain pembangunan ekonomi masyarakat miskin. Untuk itu penyusunan desain pembangunan ekonomi dengan pendekatan Community Based Economic Development (CBED) dinilai sangat tepat untuk dilakukan. CBED merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dalam prosesnya menekankan pada pendekatan program secara partisipatif sehingga kelompok sasaran akan merasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Dalam proses ini pendampingan terhadap kelompok mutlak harus dilakukan. Kegiatan pendampingan selama ini diyakini sebagai metode yang efektif dipergunakan untuk mengawal proses perubahan perilaku sosial masyarakat. Pembentukan perilaku baru yang dilandasi atas kesadaran mengenai *mutual trust* dan *mutual benefits* para pihak merupakan langkah strategis yang bisa ditempuh agar suasana keamanan dan jaminan keberlanjutan kegiatan operasional usaha tetap terus terjaga.

Berbagai aktivitas yang terkait mulai dari pengenalan potensi yang ada, teknologi, informasi, sampai dengan pengelolaan hubungan kemitraan dengan kelompok sasaran dapat dirangkai ke dalam satu sistem peningkatan kapasitas kelembagaan yang mendukung prinsip pemberdayaan masyarakat. Salah satu hal penting yang dapat diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia selama ini adalah adanya sensitivitas anggota masyarakat terhadap pilihan pendekatan pemulihan kehidupan yang ditempuh. Secara umum, terdapat tiga pendekatan pemulihan yang sudah diterapkan, yaitu: (1) pemberdayaan berbasis kebutuhan untuk melakukan restorasi kehidupan masyarakat; (2) reformulasi pola kehidupan masyarakat yang bertumpu pada kemandirian sosial ekonomi keluarga; dan (3) upaya pemberdayaan masyarakat berbasis pada ekspektasi nilai tambah yang



dilakukan oleh sejumlah aktivitas kelompok masyarakat. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki argumen kuat untuk dapat diterapkan.

Beberapa hasil studi tentang upaya pemberdayaan kehidupan ekonomi masyarakat yang mengedepankan pada solusi terintegratif memiliki urgensi untuk diimplementasikan karena memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan suatu model *CBED* sebagai landasan implementasi kegiatan. Model ini akan membantu pemerintah untuk lebih mengenal konteks masyarakat, potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut dan potensi ekonomi yang dapat menjadi sasaran program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu model ini akan membantu masyarakat untuk lebih kreatif mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.

## 5.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyusun desain program pemberdayaan strategis melalui model *community Based Economic Development (CBED)*. *CBED* ini merupakan model gabungan antara *community development* dan *economic development*. Secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya profile rumah tangga miskin beserta data pemetaan sosial yang ada di wilayah penelitian.
- b. Merumuskan solusi terintegratif dalam kerangka pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang strategis melalui penguatan kapasitas sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.

## 5.3 Data yang Akan Dikumpulkan

Studi profiling rumah tangga miskin dan pemetaan sosial ini mencakup beberapa aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Studi ini akan diwujudkan dalam beberapa kegiatan sebagaimana disampaikan dalam penjelasan di bawah ini.



## **Penilaian Masalah Sosial-Ekonomi**

Kegiatan ini merupakan wujud upaya untuk memahami berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin. Gambaran masalah tersebut sangat diperlukan guna menyusun program sosial karena program ini dikembangkan untuk meredusir masalah sosial-ekonomi tersebut. Data-data yang akan dikumpulkan dalam kegiatan ini meliputi: (a) pendapatan rumah tangga, (b) masalah kesehatan, (c) masalah pendidikan, dan (d) masalah infrastruktur fisik.

## **Identifikasi Masalah Demografis.**

Identifikasi masalah demografis merupakan suatu kegiatan untuk memahami bentuk-bentuk masalah yang terkait dengan masalah kependudukan. Identifikasi masalah demografis akan mencakup (a) tingkat kelahiran, (b) tingkat kematian, (c) migrasi, dan (d) masalah ketenagakerjaan.

## **Identifikasi Potensi Lokal**

Identifikasi potensi ekonomi merupakan suatu studi untuk memperoleh gambaran mengenai sumber daya lokal yang bisa bermanfaat untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Gambaran mengenai sumber daya lokal ini sangat penting untuk menyusun program sosial yang mampu menggunakan sumber daya lokal sebagai basis realisasinya. Data yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi: (a) potensi alam dan (b) lembaga lokal yang mendukung kegiatan ekonomi (misalnya gotong royong).

## **Memahami Harapan Masyarakat ke Depan**

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai harapan masyarakat mengenai kondisi yang mereka anggap ideal ke depan. Data yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini harapan terkait dengan: (a) peningkatan pendapatan masyarakat, (b) ketenagakerjaan, (c) perbaikan/pembangunan fasilitas fisik, dan (d) perbaikan pelayanan publik.

## **5.4 Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan merupakan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk menumbuh



kembangkan kesadaran masyarakat, memotivasi kemampuan dalam mendayagunakan potensi yang ada berdasarkan nilai-nilai local di masyarakat. Kegiatan ini akan melibatkan beberapa ahli dari berbagai kalangan guna merumuskan arah yang tepat untuk kegiatan pemberdayaannya. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

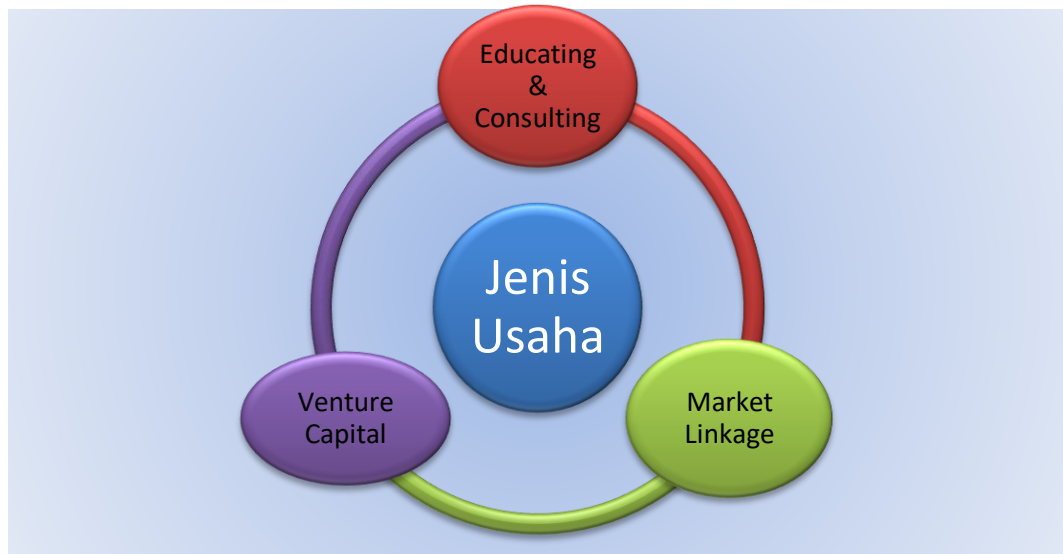
1. Pemetaan/profiling rumah tangga miskin, jenis usaha yang dilakukan, dan pemetaan potensi yang dapat dikembangkan secara ekonomi yang ada di lokasi kajian.

Kegiatan pemetaan/profiling merupakan langkah awal yang akan ditempuh oleh tim untuk memperoleh gambaran konkrit mengenai struktur sosial dan komposisi kehidupan masyarakat yang menjadi target kegiatan. Data hasil pemetaan dikumpulkan secara langsung dari anggota masyarakat di lokasi sasaran program. Untuk selanjutnya, tim akan melakukan proses identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan skills dan kompetensi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat beserta gambaran potensi yang dapat dikembangkan secara ekonomi. Kegiatan ini juga akan melibatkan para tokoh dan pemuka masyarakat yang berpengaruh guna memberikan masukan untuk penyusunan program.

Hasil dari pemetaan ini nantinya akan dirumuskan alternatif rekomendasi kebijakan yang akan ditawarkan dalam penyusunan desain kegiatan yang akan disepakati bersama dengan masyarakat. Gambaran dari hasil pemetaan pengembangan ekonomi nantinya akan menghasilkan klasifikasi jenis usaha yang ada dan yang akan berjalan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing jenis usaha tersebut. Apakah jenis usaha tersebut masih membutuhkan permodalan, ataukah membutuhkan koneksi pada pasar, ataukah jenis usaha tersebut hanya membutuhkan pendidikan manajemen untuk konsultasi pengembangannya. Adapun gambarannya sebagai berikut :



**Gambar 5.1 Gambaran Pemetaan Ekonomi Masyarakat**



Sumber : Pemikiran Peneliti

2. Penyusunan desain kegiatan.

Penyusunan desain kegiatan dilakukan secara partisipatif bersama warga masyarakat. Metode kegiatan dilakukan dengan cara FGD. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa usulan program yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan. Adapun gambaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 5.2 Penyusunan Desain Kegiatan CBED**



Sumber : Pemikiran Peneliti



## 5.5 Tenaga dan Kriteria yang Dibutuhkan

Tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan ini nantinya terdiri dari beberapa pakar utamanya dalam hal kebijakan publik, antropolog, pembangunan pedesaan, dan juga pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan. Latar belakang keilmuan ini menjadi penting dalam rangka untuk pengembangan desain yang baik dan komprehensif.



## BAB VI

### Kesimpulan dan Saran

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian pendahuluan penurunan kemiskinan dan ketimpangan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, tingkat penurunan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di DIY mengalami stagnasi. Padahal tingkat pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata nasional.
2. Persoalan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan masalah di sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin yang bekerja pada sektor pertanian di lokasi penelitian.
3. Keberadaan anggota rumah tangga miskin yang mengalami penyakit kronis dan lansia menyebabkan mereka terperangkap pada cerug kemiskinan yang lebih dalam.
4. Program bantuan sosial yang ada di masyarakat sering memunculkan konflik, dan jika tidak dikelola secara baik akan mengganggu solidaritas sosial yang ada di masyarakat. Padahal bangunan solidaritas sosial tersebut dapat dimanfaatkan sebagai *safety nets* untuk kesejahteraan bersama.
5. Dalam implementasi program perlindungan sosial kurang tercipta sinergitas yang baik, hal ini menyebabkan permasalahan pada aspek teknis di lapangan.



6. Rendahnya *dignity* masyarakat penerima manfaat program yang menyebabkan ketergantungan terhadap program sangat tinggi.
7. Model pengembangan ekonomi pedesaan dengan konsep pembangunan kawasan pedesaan berbasis potensi desa menjadi alternatif dalam pembangunan ekonomi desa utamanya melalui pembentukan BUMDes.
8. Sektor pariwisata yang merupakan *icon* dari DIY harus mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertemukan produk yang ada di masyarakat dengan pasar wisata melalui mekanisme *suplay chain management*.

## 6.2 Saran

Saran dan rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah :

1. Karena sebagian besar masyarakat miskin di DIY memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka pemerintah perlu mendorong revitalisasi pertanian dan lebih mengencangkan untuk program-program pemberdayaan petani.
2. Dalam rangka untuk mensinergikan antar program penanggulangan kemiskinan maka perlu adanya akselerasi dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
3. Perlu adanya pemilahan dalam program penanggulangan kemiskinan. Misalkan Propinsi lebih pada aspek penyiapan infrastruktur sedangkan Kabupaten lebih pada pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah desa harus menjadi leading sektor dalam perencanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di desa.
5. Perlu adanya pendekatan Community Based Economic Development dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah.
6. Membangun *showroom local product* dan *market place online* sebagai bagian dari strategi *memperpendek supply chain*.





7. Memberdayakan BUMDes, Optimalisasi asset desa, dan pasar desa demi mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat desa.
8. Perlunya pendampingan dalam proses integrasi perencanaan di desa.
9. Menjadikan Komunitas Masyarakat Sebagai Subyek langsung dalam Pembangunan Ekonomi Pariwisata. Keterlibatan masyarakat DIY dalam industri pariwisata harus dimaksimalkan dengan menjadi rantai pasok (*suplay chain management*) bisnis pariwisata agar manfaat dari industri pariwisata bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.
10. Melakukan kajian yang lebih mendalam dalam pemetaan rumah tangga miskin sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka mengentaskannya akan lebih sistematis berdasarkan karakteristik masing-masing rumah tangga.





## Daftar Pustaka

- Abebe, G. K., Bijman, J., & Royer, A. (2016). Are middlemen facilitators or barriers to improve smallholders' welfare in rural economies? Empirical evidence from Ethiopia. *Journal of Rural Studies*, 43, 203–213.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.12.004>
- Anwar, K. (2011). Investasi Pendidikan ( Suatu Fungsi untuk Pendidikan yang Bermutu ). *Jurnal Investasi Pendidikan*, 03, 1–10.
- Astuti, K. (2017). Pendidikan Berkualitas Belum Merata. Retrieved January 2, 2020, from  
<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/05/09/opoqav384-pendidikan-berkualitas-belum-merata>
- Awaliyah, G. (2018). IDI: Disparitas Pelayanan Kesehatan di Kota dan Daerah Tinggi.
- Bank Indonesia. (2015). *Skema Pembiayaan Pertanian dengan Pendekatan Konsep Rantai Nilai*. Jakarta.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019a). Gini Rasio, 2002-2019. Retrieved December 31, 2019, from  
<https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/27/gini-rasio-2002-2019.html>
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019b). PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah), 2010-2018. Retrieved December 31, 2019, from  
<https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2019/10/17/145/-seri-2010-distribusi-pdrb-d-i-yogyakarta-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2010-2018.html>
- Candra, S. A. (2017). DIY Paling Timpang Ekonominya, Namun Paling Bahagia Penduduknya. Retrieved December 16, 2019, from  
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/17/ot86kp-diy-paling-timpang-ekonominya-namun-paling-bahagia-penduduknya>
- Cook, M. L. (1995). The Future of U.S. Agricultural Cooperatives: A Neo-



- Institutional Approach. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(5), 1153–1159.
- Cresswell. (2010). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. (Terjemahan)* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deere, C., & de Janvry, A. (1979). A Conceptual Framework for the Empirical Analysis of Peasants. *American Journal of Agricultural Economics - AMER J AGR ECON*, 61. <https://doi.org/10.2307/1239907>
- Devereux, S., Masset, E., Sabates-Wheeler, R., Samson, M., Rivas, A. M., & te Lintelo, D. (2017). The targeting effectiveness of social transfers. *Journal of Development Effectiveness*, 9(2), 162–211. <https://doi.org/10.1080/19439342.2017.1305981>
- Doh, S., & Mcneely, C. L. (2012). A multi-dimensional perspective on social capital and economic development : an exploratory analysis. *The Annals of Regional Science*, 49(3), 821–843. <https://doi.org/10.1007/s00168-011-0449-1>
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Desa Membangun Indonesia* (Cetakan Pe).
- Elizabeth, R. (2007). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani : Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25(1), 29–42.
- Fantom, N., & Serajuddin, U. (2016). The World Bank's classification of countries by income. Policy research working paper. *World Bank*, (January). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7528>
- Fauzi, A. (2018). Ternyata Perempuan Lebih Banyak Menggeluti UMKM. Retrieved January 3, 2020, from <https://www.cekaja.com/info/ternyata-perempuan-lebih-banyak-menggeluti-umkm/>
- Hadna, Agus Heruanto; Zamroni, Sunaji; Hidayana, Bambang; Purwanto, E. A. (2017). *Kajian Implementasi Dana Desa 2017*. Yogyakarta.
- Haryati, S. (2009). Peran Pendidikan dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Bangsa. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 31, 24–43.
- Hayami, Y., Sajogyo, & Kikuchi, M. (1987). *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- healthdata.org. (2015). Deaths From Cardiovascular Disease Increase Globally While Mortality Rates Decrease.
- Ikhsan, M. (2010). *Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Irwandy, Perdana, N., & Rislamind, D. S. (2013). Analisis Disparitas Kualitas Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal AKK*, 2(1),



42–50.

- Juul, S. (2010). Solidarity and social cohesion in late modernity: A question of recognition, justice and judgement in situation. *European Journal of Social Theory*, 13(2), 253–269. <https://doi.org/10.1177/1368431010362296>
- Kabarkota.com. (2019). Melihat Potret Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Upaya Penanggulangannya | Kabarkota.com.
- katadata.co.id. (2018). Penyakit Kardiovaskular, Penyebab Kematian Terbanyak di Dunia.
- Kemkes. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- kumparan.com. (2018). DIY, Provinsi Termiskin di Jawa dengan Ketimpangan Ekonomi Tertinggi.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lai, Y., Peng, Y., Li, B., & Lin, Y. (2014). Industrial land development in urban villages in China: A property rights perspective. *Habitat International*, 41, 185–194. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.08.004>
- Laksono, A. D. (2016). Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan. In *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia* (pp. 5–20). Jakarta: Kanisius.
- M Zulkarnaen, R. (2016). Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset , jasa kesejahteraan masyarakat Desa. *Aplikasi Iptek Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4.
- Marshall, T. . (1950). *Marshall\_Citizenship\_and\_Social\_Class1950*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Midgley, J. (2009). *The Handbook of Social Policy*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452204024>
- Ng, A., Mirakhor, A., & Ibrahim, M. H. (2015). *Social Capital and Risk Sharing*. New York: Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137476050>
- Nurcaya, I. A. H. (2019). UMKM Tangguh Jadi Fondasi Hadapi Resesi Global - Ekonomi Bisnis.com. Retrieved January 3, 2020, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191019/9/1160906/umkm-tangguh-jadi-fondasi-hadapi-resesi-global>
- Papadopoulos, T., & Roumpakis, A. (2017). Family as a Socio-economic Actor in the Political Economies of East and South East Asian Welfare Capitalisms. *Social Policy and Administration*, 51(6), 857–875. <https://doi.org/10.1111/spol.12336>
- Prasetyo, R. A. (2017). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo



- Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, xi(1).
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, (13), 35–42.
- Putra, S. A. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN (2014). Indonesia.
- Ritchie, Robert, Brindley, Clare S. and Armstrong, N. (2008). Risk assessment and relationship management : practical approach to supply chain risk management.
- Sajogyo; Sajogyo, P. (2002). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sen, A. (1985). A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers*, 37(4), 669–676. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2663049>
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Suharmiati, Handayani, L., & Kristiana, L. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15(3), 223–231.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic growth and poverty reduction in Indonesia before and after the Asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 209–227. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155>
- Suseno, D., & Suyatna, H. (2007). Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 267–294. <https://doi.org/10.22146/JSP.11008>
- Tarmidzi dan Arismiyati, I. (2018). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *DIMAS*, 18(1), 129–142.
- The World Bank. (2015). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta.
- Tjoe, Y. (2018). Pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun hanya dinikmati orang kaya. Seberapa parah ketimpangan di Indonesia? Retrieved December 31, 2019, from <http://theconversation.com/pertumbuhan-ekonomi-selama-20-tahun-hanya-dinikmati-orang-kaya-seberapa-parah-ketimpangan-di-indonesia-102107>
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial (Pertama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- von Hauff, M. (2002). The relevance of social security for economic development. *Social Protection in Southeast & East Asia*, 15–20.
- Wang, T., Lan, Q., & Chu, Y. (2013). Supply Chain Financing Model : Based on China ' s Agricultural Products Supply Chain. In *the 2nd International Conference On Systems Engineering and Modeling (ICSEM-13)* (pp. 153–157).
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, R., & Izzati, R. Al. (2018). *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia , 2006-2016 (Draf)*. Jakarta.
- Widgren, Ö. (1997). Social Solidarity and Social Exchange. *Sociology*, 31(4), 755–771. <https://doi.org/10.1177/0038038597031004007>
- Wolff, J., Lamb, E., & Zur-szpiro, E. (2015). a Philosophical Review of Poverty, (June).
- Yustika, A. E., & Baksh, R. (2016). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian, dan Keadaulatan Pangan (Kedua)*. Malang: Empat Dua.
- Zuraya, N. (2018). Kemendes: Jumlah BUMDes Mencapai 41 Ribu Unit. *Republika.Co.Id*.





# Lampiran



**Tabel Pemetaan Potensi Desa dan Rekomendasi Kebijakan  
Studi Pendahuluan Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta  
2019**

<b>I. Kabupaten Sleman</b>				
<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Potensi Desa</b>	<b>Kendala</b>	<b>Rekomendasi</b>
1	<b>Merdikorejo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian salak dan Budidaya Jamur Merang</li> <li>2. Peternakan: ayam, kambing, sapi, kelinci</li> <li>3. UMKM: Sentra Jamu Tradisional di Dusun Gesikan.</li> <li>4. Wisata yang mengandalkan sumber daya alam kali Krasak (Pengembangan Desa Wisata)</li> <li>5. Seni Budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran secara nasional dan global.</li> <li>2. Belum adanya sarana da prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>3. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>4. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>5. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>6. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>7. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>8. Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> <li>9. Kurangnya peran SID dalam mempromosikan potensi desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.</li> <li>2. Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa.</li> <li>3. Melakukan <i>branding</i> desa</li> <li>4. Melakukan analisis LERD (<i>Local Economic Resources Development</i>)</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</li> <li>6. Pelatihan peningkatan produksi, pemasaran produk pertanian dan peternakan, <i>packging</i> produk, pemasaran produk secara online, dan manajemen distribusi pupuk yang merata.</li> <li>7. Mengoptimalkan tata kelola lumbung desa.</li> <li>8. Mengaktifkan dan mengoptimalkan keberadaan SID dan <i>update</i> Profil Desa.</li> <li>9. Membangun budaya pertanian organic dan melakukan pemetaan serta analisis</li> </ol>

			<p>10. Lemahnya koordinasi antar dusun dengan desa</p> <p>11. Akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan</p> <p>12. Kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian sehingga hanya bergantung kepada laki-laki saja.</p> <p>13. Permasalahan irigasi yang mengganggu produksi pertanian masyarakat desa</p> <p>14. Masih minimnya peran aktif BUMDEs.</p> <p>15. Belum adanya <i>masterplan</i> destinasi wisata baru</p>	<p>kebutuhan pangan masyarakat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan desa.</p> <p>10. Memberdayakan BUMDEs, Optimalisasi asset desa, kios, dan pasar desa demi mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat desa.</p> <p>11. Membangun <i>showroom local product</i> dan <i>market place online</i></p> <p>12. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) berbagai kelompok masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan desa.</p>
--	--	--	--	--

I. Kabupaten Sleman				
Desa		Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
2	Lumbungrejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian salak dan pembibitan bawang merah</li> <li>2. UMKM: dodol, manisan, roti, geplak salak, kerajinan tangan, batik, dll.</li> <li>3. Wisata yang mengandalkan sumber daya alam kali Krasak (Pengembangan Desa Wisata)</li> <li>4. Seni Budaya</li> <li>5. Modal Sosial yang kuat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>2. Belum adanya sarana da prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>3. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>4. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>5. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>6. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>7. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>8. Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> <li>9. Kurangnya peran SID dalam mempromosikan potensi desa.</li> <li>10. Lemahnya koordinasi antar dusun dengan desa</li> <li>11. Akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan</li> <li>12. Kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian sehingga hanya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.</li> <li>2. Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa.</li> <li>3. Melakukan <i>branding</i> desa</li> <li>4. Melakukan analisis LERD (<i>Local Economic Resources Development</i>)</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</li> <li>6. Pelatihan peningkatan produksi, pemasaran produk pertanian dan peternakan, <i>packging</i> produk, pemasaran produk secara online, dan manajemen distribusi pupuk yang merata.</li> <li>7. Mengoptimalkan tata kelola lumbung desa.</li> <li>8. Mengaktifkan dan mengoptimalkan keberadaan SID dan <i>update</i> Profil Desa.</li> <li>9. Membangun budaya pertanian organic dan melakukan pemetaan serta analisis kebutuhan pangan masyarakat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan desa.</li> <li>10. Memberdayakan BUMDES, Optimalisasi asset desa, kios, dan pasar desa demi mempercepat</li> </ol>

			<p>bergantung kepada laki-laki saja.</p> <p>13. Permasalahan irigasi yang mengganggu produksi pertanian masyarakat desa</p> <p>14. Masih minimnya peran aktif BUMDEs.</p> <p>15. Belum adanya <i>masterplan</i> destinasi wisata baru</p>	<p>peningkatan perekonomian masyarakat desa.</p> <p>11. Membangun <i>showroom local product</i> dan <i>market place online</i></p> <p>12. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) berbagai kelompok masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan desa.</p>
--	--	--	---	--

I. Kabupaten Sleman			
Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
Pondokrejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seni dan Budaya Desa: Hadroh, Badui, Kobro.</li> <li>2. Pertanian (tapi kalau masuk di musim kemarau menjadi kekeringan)</li> <li>3. Wisata lembah kali krasak baru dirintis 2017 → dengan pembentukan pokdakwis. Pelaku kegiatan ada yang dari warga miskin, membuka lapak di wisata lembah kali krasak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>2. Belum adanya sarana da prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>3. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>4. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>5. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>6. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>7. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>8. Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> <li>9. Kurangnya peran SID dalam mempromosikan potensi desa.</li> <li>10. Lemahnya koordinasi antar dusun dengan desa</li> <li>11. Akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan</li> <li>12. Kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian sehingga hanya bergantung kepada laki-laki saja.</li> <li>13. Permasalahan irigasi yang mengganggu produksi pertanian masyarakat desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.</li> <li>2. Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa.</li> <li>3. Melakukan <i>branding</i> desa</li> <li>4. Melakukan analisis LERD (<i>Local Economic Resources Development</i>)</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</li> <li>6. Pelatihan peningkatan produksi, pemasaran produk pertanian dan peternakan, <i>packging</i> produk, pemasaran produk secara online, dan manajemen distribusi pupuk yang merata.</li> <li>7. Mengoptimalkan tata kelola lumbung desa.</li> <li>8. Mengaktifkan dan mengoptimalkan keberadaan SID dan <i>update</i> Profil Desa.</li> <li>9. Membangun budaya pertanian organic dan melakukan pemetaan serta analisis kebutuhan pangan masyarakat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan desa.</li> <li>10. Memberdayakan BUMDEs, Optimalisasi asset desa, kios, dan pasar desa demi mempercepat</li> </ol>

		14. Masih minimnya peran aktif BUMDEs. 15. Belum adanya <i>masterplan</i> destinasi wisata baru	peningkatan perekonomian masyarakat desa. 11. Membangun <i>showroom local product</i> dan <i>market place online</i> 12. Peningkatan kapasitas ( <i>capacity building</i> ) berbagai kelompok masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan desa.
--	--	--	---



I. Kabupaten Sleman				
Desa		Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
4	Banyurejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian</li> <li>2. Industri kerajinan (tapi kurang menonjol)</li> <li>3. Industri rumahan pengolahan makanan (Dukuh Gondang banyak yang membuat masakan bebek bacem)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>2. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>3. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>4. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>5. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>6. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>7. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>8. Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> <li>9. Kurangnya peran SID dalam mempromosikan potensi desa.</li> <li>10. Lemahnya koordinasi antar dusun dengan desa</li> <li>11. Akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan</li> <li>12. Kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian sehingga hanya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.</li> <li>2. Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa.</li> <li>3. Melakukan <i>branding</i> desa</li> <li>4. Melakukan analisis LERD (<i>Local Economic Resources Development</i>)</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</li> <li>6. Pelatihan peningkatan produksi, pemasaran produk pertanian dan peternakan, <i>packaging</i> produk, pemasaran produk secara online, dan manajemen distribusi pupuk yang merata.</li> <li>7. Mengoptimalkan tata kelola lumbung desa.</li> <li>8. Mengaktifkan dan mengoptimalkan keberadaan SID dan <i>update</i> Profil Desa.</li> <li>9. Membangun budaya pertanian organik dan melakukan pemetaan serta analisis kebutuhan pangan masyarakat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan desa.</li> <li>10. Memberdayakan BUMDEs, Optimalisasi asset desa, kios, dan pasar desa demi mempercepat</li> </ol>

			<p>bergantung kepada laki-laki saja.</p> <p>13. Permasalahan irigasi yang mengganggu produksi pertanian masyarakat desa</p> <p>14. Masih minimnya peran aktif BUMDEs.</p> <p>15. Belum adanya <i>masterplan</i> destinasi wisata baru</p>	<p>peningkatan perekonomian masyarakat desa.</p> <p>11. Membangun <i>showroom local product</i> dan <i>market place online</i></p> <p>12. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) berbagai kelompok masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan desa.</p>
--	--	--	---	--

II. Kabupaten Bantul				
No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
1	Selopamioro	1. Pertanian 2. Peternakan 3. Pariwisata	1. Belum maksimalnya Tata Ruang Desa 2. SID yang masih lemah 3. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian yang masih minim (seperti: jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi, Embung Desa, Talud Penahan Tanah/TPT, SPAH, dan SPAL) 4. Belum berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat (seperti: Pasar desa, kios desa, gedung seni budaya desa, <i>homestay</i> , PJU dll) 5. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDEs.	1. Pendataan, Penyusunan, dan Pemuktahiran data desa dalam bentuk buku profil. 2. Pengaktifan dan pengembangan SID demi membuka akses informasi dan komunikasi dan untuk tujuan promosi dan <i>branding</i> desa. 3. Pemeliharaan dan Pembangunan sarana da prasarana desa, seperti: jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan umum, jaringan informasi dan komunikasi, 4. Pengembangan pariwisata desa. 5. Pendampingan dan Pengelolaan sampah berbasis <i>waste management</i> . 6. Pembinaan kelompok social kemasyarakatan 7. Pengembangan BUMDEs

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
2	Sriharjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektor pariwisata terdiri dari: Wisata alam (Sawah, gunung, bukit, sungai, air terjun, Wisata Budaya, Wisata Religi, dan Wisata Edukasi (edukasi pertanian, peternakan, dan edukasi pengolahan makanan seperti pembuatan rempeyek dan kerupuk).</li> <li>2. Pertanian bawang merah, palawija (untuk saat ini diutamakan bawang merah)</li> <li>3. Lahan yang luas dan subur</li> <li>4. Kepemilikan ternak sakala kecil-besar di semua padukuhan.</li> <li>5. Ekonomi kreatif (sablon, konveksi, batik) dan UMKM, seperti: Olahan pangan (kerupuk, macaroni, Sentra Industri Rempeyek Pelemadu, tempe koro, keripik sagu, jamu), mebel, dan kerajinan (rajut, keris, peci, tas, dompet, cincin batok kelapa, kulit, perak, batu akik)</li> <li>6. Seni dan Budaya, seperti: Karawitan, Jathilan, Gejog Lesung, Wayang Kulit, Reog, Tatah Sungging, Ronda Theglog, Kethoprak, dan Shalawatan/Hadroh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya <i>masterplan</i> pariwisata desa.</li> <li>2. Belum optimalnya SID dan Pembaharuan data dan informasi desa.</li> <li>3. Batu akik bersifat musiman sehingga peminatnya menjadi berkurang.</li> <li>4. BUMDES belum dikelola dengan maksimal.</li> <li>5. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>6. Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> <li>7. Belum adanya rancangan/desain dan tata ruang dan wilayah desa yang komprehensif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perencanaan dan pemetaan kawasan wisata desa.</li> <li>2. Membangun sarana dan prasarana (seperti, jalan, jembatan, penerangan jalan umum/PJU, IPAL Komunal, <i>rest area</i>, jaringan komunikasi dan informasi) dalam mendukung aksesibilitas ke objek wisata desa.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.</li> <li>4. Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa.</li> <li>5. Melakukan <i>branding</i> desa</li> <li>6. Melakukan analisis LERD</li> <li>2. (<i>Local Economic Resources Development</i>)</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.</li> <li>4. Pelatihan peningkatan produksi, pemasaran produk pertanian dan peternakan, <i>packging</i> produk, pemasaran produk secara online, dan manajemen distribusi pupuk yang merata.</li> <li>5. Mengoptimalkan tata kelola lumbung desa.</li> <li>6. Mengaktifkan dan mengoptimalkan keberadaan SID dan <i>update</i> Profil Desa.</li> <li>7. Membangun budaya pertanian organic dan melakukan pemetaan</li> </ol>

		<p>7. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat di desa yang memiliki modal social yang kuat, seperti: Kelompok Petani Pengguna Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Petani Pengguna Air (GP3A), Kelompok Tani Wanita (KWT), Pemuda Petani (Taruna Tani), Kelompok Kandang, Kelompok Perikanan, Kelompok Kesenian, Forum Komunikasi Antar Umat Beragam (FKUB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB),</p>	<p>serta analisis kebutuhan pangan masyarakat demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan desa.</p> <p>8. Menggalakkan Gerakan “<i>Jemuwah Mbrakah</i>” yakni gerakan untuk mencintai produk pangan lokal.</p> <p>9. Melakukan manajemen dan tata kelola pakan dan limbah ternak dan sampah sehingga berdaya guna berbasis <i>waste management</i>.</p> <p>10. Memberdayakan BUMDEs, Optimalisasi asset desa, kios, dan pasar desa demi mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat desa.</p> <p>11. Membangun <i>showroom local product</i> dan <i>market place online</i></p> <p>12. Mempersiapkan pembuatan Rancangan Detail Tata Ruang dan Wilayah Desa.</p> <p>13. Pendampingan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan Desa untuk mengoptimalkan potensi olahraga desa.</p> <p>14. Peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) berbagai kelompok masyarakat yang ada untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>15. Pembentukan Dewan Kebudayaan Desa dan Pembangunan Gedung Seni dan Budaya desa.</p>
--	--	--	---

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
3	Wukirsari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Agribisnis (Persawahan seluas 2/3 dari wilayah desa).</li> <li>2. Kawasan Cagar Budaya</li> <li>3. Kawasan Cagar Alam</li> <li>4. Kawasan Lindung Bawahan</li> <li>5. Kawasan Wisata Minat Khusus</li> <li>6. Industri Kerajinan Rumah Tangga (kerajinan dan makanan olahan)</li> <li>7. Pertanian dan Peternakan</li> <li>8. Seni dan Budaya (Majemukan, Nguras Guci, Suran, Selikuran, Sadranan, Rejeban, Mauludan, Kupatan, Karawitan, Ketoprak, Wayang Kulit, Seni Thek-Thek, Gejok Lesung, Keprajuritan).</li> <li>9. Keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki modal social yang kuat seperti: Remaja Masjid, Karang Taruna, Jam'iyah Yasin, Tahlil, PKK, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, dsb.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya Tata Ruang Desa</li> <li>2. SID yang masih lemah</li> <li>3. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian yang masih minim (seperti: jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi, Embung Desa, Talud Penahan Tanah/TPT, SPAH, dan SPAL)</li> <li>4. Belum berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat (seperti: Pasar desa, kios desa, gedung seni budaya desa, <i>homestay</i>, PJU dll)</li> <li>5. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDEs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM seperti: Irigasi, Embung, Kandang peternakan, Jalan Usaha Tani, Lumbung Desa, serta alat pertanian dan peternakan.</li> <li>2. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat.</li> <li>3. Intensifikasi dan Diversifikasi lahan pertanian dan peternakan</li> <li>4. Pengembangan Kawasan Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Kawasan Industri Kerajinan.</li> <li>5. Pembuatan Balai Latihan Kerja dan Pendampingan pemuda siap kerja.</li> <li>6. Pelatihan teknologi tepat guna (TTG seperti penggunaan biogas, microhydro, EBT, dan <i>waste management</i>)</li> <li>7. Pelatihan manajemen UMKM dan Inovasi Desa.</li> <li>8. Pengembangan Kapasitas GAPOKTAN, POKDARWIS, dan P3A</li> <li>9. Pengembangan kapasitas pengurus BUMDEs.</li> <li>10. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas masyarakat desa dan kelompok social kemasyarakatan, khususnya para pemuda dan ibu-ibu yang berbasis ekonomi lokal dan berskala global.</li> </ol>

				11. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat dan seni budaya desa demi mewujudkan desa budaya.
--	--	--	--	---

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
4	Karangtengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri mebel, bubut, kerajinan rangka keris</li> <li>2. Industri makanan (tempe kedelai, crimping pisang, tahu, tempe, keripik, peyek)</li> <li>3. Keberadaan lahan pertanian yang luas dan subur dan pasokan air irigasi yang melimpah.</li> <li>4. Perkebunan, seperti: manga, rambutan, pisang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya peran SID dalam mempromosikan potensi desa.</li> <li>2. Lemahnya koordinasi antar dusun dengan desa</li> <li>3. Akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan</li> <li>4. Kurang aktifnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian sehingga hanya bergantung kepada laki-laki saja.</li> <li>5. Permasalahan irigasi yang mengganggu produksi pertanian masyarakat desa</li> <li>6. Masih minimnya peran aktif BUMDEs.</li> <li>7. Belum adanya <i>masterplan</i> destinasi wisata baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas SDM (seperti: aparatur desa, pemuda, dan anak-anak)</li> <li>2. Pemberdayaan usaha kecil pedesaan dan penyertaan bantuan modal usaha</li> <li>3. Pengembangan produk pertanian dan peternakan untuk mewujudkan ketahanan pangan</li> <li>4. Pembangunan kapasitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM.</li> <li>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa.</li> <li>6. Penyuluhan dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li> <li>7. Pelatihan dan Pendampingan kapasitas perempuan desa</li> <li>8. Pengembangan Destinasi Wisata Baru dan</li> <li>9. Melakukan pemetaan dan tata kelola ruang dan wilayah yang baik.</li> </ol>



### III. Kabupaten Kulon Progo

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
1	Hargomulyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desa budaya</li> <li>UMKM</li> <li>Pariwisata</li> <li>Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>Belum adanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> <li>Kurangnya varietas pangan yang berdampak terhadap ketahanan pangan desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat produk unggulan desa melalui kelompok-kelompok perempuan, seperti gula aren, gula semut, air nira kelapa.</li> <li>Megembangkan Gunung Suro dan Sendang Pengilon. Desa sudah memberikan support untuk membuat tangga, pembinaan, operasional perikanan.</li> <li>Memperkuat usaha kelompok tani, mencari cara bagaimana menghasilkan produk yang banyak dengan lahan yang sempit, mengingat lahan pertanian di Hargomulyo sudah mulai susah.</li> <li>Mendorong kelompok tani untuk mengelola tanah desa di sana untuk pengembangbiakan tanaman yang kira-kira produktif, seperti pisang.</li> </ol>

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
2	Hargorejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi wisata desa di beberapa wilayah, seperti: Eks Tambang Mangan, Lembah Kedung Luweng, Kebun buah, dst</li> <li>2. Wisata Budaya, seperti: Kuda lumping, hadroh, wayang, ketoprak, kelompok karawitan.</li> <li>3. Tambang, seperti: Emas dan Batu Andesit.</li> <li>4. Industri rumah tangga, seperti: kerajinan dan makanan olahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>2. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>3. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>4. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>5. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</li> <li>6. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</li> <li>7. Kurangnya kapasitas produksi, <i>packaging</i>, pemodalan, hingga pemasaran produk UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata desa dan jaringan air bersih desa.</li> <li>2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa, meliputi antara lain lapangan bulutangkis, voley, tenis lapangan, kolam renang, dsb.</li> <li>3. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, seperti: Embung/Bangunan Penampung Air, sumur (bor dan gali), irigasi, dan lumbung desa.</li> <li>4. Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Seni dan Budaya demi mendukung peningkatan festival budaya desa.</li> <li>5. Pembangunan Sarana Pendukung Pasar Desa/Kios Desa.</li> <li>6. Pembangunan dan pengelolaan BUMDEs.</li> <li>7. Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Instalasi Biogas.</li> <li>8. Melakukan Inovasi Pengembangan Teknologi Pembuatan/Pengolahan Pakan Ternak dan Ikan.</li> <li>9. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pengrajin, kelompok tani, kelompok masyarakat pemerhati dan perlindungan anak, kelompok perempuan, kelompok ekonomi produktif, kelompok pemuda,</li> </ol>

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
3	Hargotirto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk hasil pertanian dan peternakan, seperti: gula jawa, gula semut, susu, bibit, dan daging kambing ETAWA, daging ayam, dan abon kelinci.</li> <li>2. Desa wisata berbasis sumber daya alam seperti: Gunung Gajah, Wisata Alam Pule Payung, Wisata Alam Curug Sedhuwagang, Wisata Alam Curug Sekrasak, Wisata Alam Curug Kaligung, Wisata Alam Kelok Bukit Slem pang, Wisata Alam Gunung Ijo, Wisata Edukasi berbasis alam, dll.</li> <li>3. Produksi hasil pertanian-perkebunan seperti: Durian dan Manggis.</li> <li>4. Produksi kayu keras (kayu mahoni, albasia, sonokeling, mangir, dan jati) dan bamboo.</li> <li>5. Cengkeh dan Kakao</li> <li>6. Batu Andesit</li> <li>7. Seni dan Budaya Desa (seperti Jathilan, dsb)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi gula jawa dan gula semut masih menggunakan metode konvensional terutama pada proses pengentalan, pengkristalan, dan pengeringan.</li> <li>2. Petani pohon kelapa yang merupakan penghasil nira, masih menggunakan lahan dengan system tumpang sari.</li> <li>3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan produksi dan pemasaran nasional dan global.</li> <li>4. Belum adanya sarana da prasarana penunjang pariwisata yang memadai.</li> <li>5. Belum maksimalnya kapasitas SDM Pariwisata di desa.</li> <li>6. Minimnya paket wisata desa dan wahana lainnya yang menarik kunjungan wisatawan.</li> <li>7. Belum maksimalnya branding dan marketing pariwisata desa di tingkat nasional dan global.</li> <li>8. Belum adanya lahan khusus untuk budidaya durian dan manggis khas desa untuk bahan ekspor.</li> <li>9. Belum adanya system manajemen yang terpadu dan berkelanjutan dalam pengembangan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya pendampingan, pelatihan, dan pemberian teknologi modern dalam system produksi gula jawa dan gula semut.</li> <li>2. Perlu adanya pengembangan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMKM desa serta mengaktifkan dan memaksimalkan keberadaan BUMDES demi mewujudkan kemandirian perekonomian desa.</li> <li>3. Perlunya pengembangan kapasitas kelompok tani gula jawa dan gula semut agar lebih produktif.</li> <li>4. Perlu adanya ketersediaan lahan khusus dari pemerintah untuk petani, sehingga dapat mengembangbiakkan kelapa dan pengembangan produksi gula jawa dan gula semut.</li> <li>5. Perlu adanya pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), dan kelompok ternak yang berkelanjutan.</li> <li>6. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan pendukung, serta membantu</li> </ol>

			<p>pemanfaatan produksi kayu dan bamboo tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.</p> <p>10. Belum adanya penataan kawasan khusus untuk pengembangan produksi cengkeh dan kakao desa.</p> <p>11. Belum adanya kajian lingkungan hidup dan pengembangan kawasan industry pengolahan batu andesit.</p> <p>12. Belum terbukanya system ramah investasi di desa.</p> <p>13. Pagelaran seni budaya hanya bersifat musiman dan jangka pendek.</p>	<p>proses <i>branding</i> dan <i>marketing</i> di kancah nasional dan global.</p> <p>7. Melakukan pemetaan potensi wisata desa dan pembangunan pariwisata desa. Selain itu, perlu dilakukannya <i>Community based EcoTourism</i> dan tata kelola pariwisata desa berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.</p> <p>8. Pengembangan SID dan media social lainnya demi meningkatkan publikasi wisata desa dan branding desa wisata.</p> <p>9. Penyediaan lahan khusus untuk produksi durian dan manggis yang nantinya juga dapat menambah lapangan pekerjaan masyarakat desa, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.</p> <p>10. Perlu adanya system manajemen berkelanjutan dalam produksi dan distribusi kayu dan bamboo yang melimpah di desa. Selain itu, potensi ini juga dapat dikembangkan menjadi objek wisata.</p> <p>11. Perawatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung desa seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan komunikasi dan informasi, <i>homestay</i>, <i>tourist information center</i>, penerangan jalan umum, dsb.</p>
--	--	--	--	---

				<p>12. Perlu adanya riset dan pengembangan terkait dengan cengkeh, Kakao, dan batu andesit yang melimpah di desa ini. Sehingga nantinya dapat dibentuk kawasan produksi khusus yang dapat membudidayakan produk tersebut dan tentunya dapat menarik datangnya investor.</p> <p>13. Perlunya pengadaan event budaya yang dapat menarik datangnya wisatawan, dan perlu juga adanya kalender wisata budaya setiap tahunnya di desa.</p>
--	--	--	--	--

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
4	Kalirejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi wisata alam dengan dukungan wilayah yang 90% pegunungan dan bukit yang indah dan hijau. Contoh, wisata Gunung Agung, Gunung Bolong, Wisata Religi Sebatur di Kalibuko, Makam KGPH Joyo Kusumo Sengir.</li> <li>2. Ketersediaan lahan kering yang sangat luas.</li> <li>3. Banyaknya atraksi adat dan budaya lokal seperti: Kuda Lumping/Jathilan, Kethoprak, Karawitan, Shalawatan, Nyadran, Kepungan, Saparan, Kenduri, dan Bersih Desa.</li> <li>4. Produksi pertanian seperti: gula semut, kayu, dan bambu. Keberadaan Kampung Gula Semut yang dibuka oleh para beaswan LPDP ke-47.</li> <li>5. Hasil tambang seperti: emas, batu andesit, dan batuan lainnya.</li> <li>6. Sektor perkebunan, seperti: buah durian, manggis, alpukat, dan langsep.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data desa dan potensi desa yang kurang lengkap dan valid.</li> <li>2. SDM di desa yang kurang mumpuni dalam mengelola daerah wisata dan hasil alam.</li> <li>3. Sarana dan prasarana desa yang belum maksimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM desa, mulai dari pamong desa, PKK Desa, Lembaga Desa, pemuda desa, dan masyarakat desa.</li> <li>2. Perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari berbagai pihak terkait (akademisi, bisnis, pemerintah, dan media massa) agar budaya dan tradisi lokal tersebut tidak hilang ditelan waktu dan dapat dijadikan sebagai wisata budaya.</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan social ekonomi masyarakat desa, seperti: jalan, jembatan, penerangan jalan umum, drainase, pasar desa, kios desa, dan lembaga keuangan mikro desa.</li> <li>4. Melakukan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan berbasis pada inovasi dan Teknologi Tepat Guna.</li> <li>5. Melakukan pemetaan dan kajian komoditas unggulan desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas produksi, pengembangan rantai nilai pasar, dan penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan.</li> </ol>

				<p>6. Memaksimalkan keberadaan koperasi dan BUMDES serta lembaga lainnya untuk meningkatkan tata kelola potensi desa.</p> <p>7. Mempermudah akses masyarakat desa dalam memperoleh bantuan modal usaha dan pemasaran produk berbasis digital.</p>
--	--	--	--	---

#### IV. Kabupaten Gunungkidul

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
1	Giriharjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan pertanian kering yang cukup luas.</li> <li>2. Hutan rakyat seluas 170 Ha.</li> <li>3. Sumber daya pertambangan, seperti: batu kapur dan stalaksit.</li> <li>4. Peternakan, seperti: sapi, kambing, ayam buras, dan ayam potong.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termasuk daerah rawan kekeringan.</li> <li>2. Tingginya risiko kegagalan dalam budidaya pertanian, yang menyebabkan rendahnya hasil produksi dan posisi tawar produk pertanian, kurangnya informasi pasar, penguasaan IT dan lemahnya akses permodalan untuk sector pertanian.</li> <li>3. Maraknya penebangan kayu liar sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan kelestarian hutan.</li> <li>4. Rendahnya investasi karena regulasi yang kurang adaptif dan produktif.</li> <li>5. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa.</li> <li>6. Kurangnya fasilitasi dan penataan lingkungan dan pemukiman desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan memelihara infrastruktur pertanian, seperti: jaringan irigasi dan konservasi embung, distribusi pupuk dan bibit, serta pemberian bantuan alat pertanian.</li> <li>2. Mengoptimalkan potensi SDA dan SDM untuk meningkatkan PAD, baik melalui program pelatihan dan keterampilan ekonomi produktif, dsb.</li> <li>3. Menjalin kerja sama berbasis <i>pentahelix</i> model dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan yang berkelanjutan.</li> <li>4. Pembangunan sarana dan prasarana dasar desa, termasuk pembangunan dan pengembangan pasar desa.</li> <li>5. Meningkatkan penggunaan SID demi menunjang pembangunan desa.</li> <li>6. Mengembangkan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa.</li> <li>7. Membentuk dan mengembangkan BUMDEs.</li> <li>8. Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam mengembangkan produk unggulan desa.</li> </ol>



				<p>9. Pembangunan dan pengelolaan hutan dan energy mandiri secara berkelanjutan.</p> <p>10. Pengembangan ternak kolektif berbasis masyarakat.</p> <p>11. Mengembangkan objek wisata desa secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan teknologi (<i>ecotech tourism</i>).</p> <p>12. Penguatan modal usaha mikro berbasis desa.</p> <p>13. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya desa serta menyelenggarakan festival budaya rutin di desa.</p> <p>14. Pembinaan dan pelatihan kelompok-kelompok di masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok UMKM, kelompok ternak,</p>
--	--	--	--	---

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
2	Girikarto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan lahan kering tadah hujan yang sangat luas</li> <li>2. Hutan produksi yang cukup luas.</li> <li>3. Bahn tambang berupa bahan galian C, seperti: batu zeolite, batu putih, batu cadas, dan batu breksi.</li> <li>4. Industri kecil dan <i>home industry</i>, seperti: oalahan makanan berupa kerupuk rambak, emping jagung, criping singkong, sirup markisa, jamu tradisional, bakpao, cucur, gorengan, dan tempe. Sedangkan kerajinan tangan seperti: bamboo, mebel, dan batik.</li> <li>5. Wisata dan budaya laut di selatan desa, seperti: Pantai Gesing, Pantai Wohkudu, dan Pantai Kesirat.</li> <li>6. Hasil pertanian-perkebunan dan peternakan seperti: padi gogo, palawija, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, polo kependem, srikaya, mete, mlinjo, nangka, sirsat, manga, kelapa, bamboo, jati, mahoni, dan sono keling. Peternakan seperti: sapi lokal, kambing lokal, ayam buras, ayam Bangkok, ayam ras, ayam kate, ayam petelur, dan ayam pedaging.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termasuk daerah rawan kekeringan.</li> <li>2. Tingginya risiko kegagalan dalam budidaya pertanian, yang menyebabkan rendahnya hasil produksi dan posisi tawar produk pertanian, kurangnya informasi pasar, penguasaan IT dan lemahnya akses permodalan untuk sector pertanian.</li> <li>3. Maraknya penebangan kayu liar sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan kelestarian hutan.</li> <li>4. Rendahnya investasi karena regulasi yang kurang adaptif dan produktif.</li> <li>5. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa.</li> <li>6. Kurangnya fasilitasi dan penataan lingkungan dan pemukiman desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pemuktahiran data dan profil desa, serta mengintegrasikannya dengan SID.</li> <li>2. Penggunaan teknologi tepat guna pada sector pertanian dan pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap petani dan peternak komoditas unggulan desa.</li> <li>3. Perawatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung desa seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan komunikasi dan informasi, <i>homestay</i>, <i>tourist information center</i>, penerangan jalan umum, dsb.</li> <li>4. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata desa.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata dan Penguatan organisasi dan kelembagaan pariwisata desa, melalui pelatihan dan penyelenggaraan event tahunan seperti festival seni dan budaya.</li> <li>6. Menggali dan melestarikan adat dan seni budaya desa melalui ekspose seni budaya desa, pelatihan kelompok, dan</li> </ol>

				<p>pengadaan ruang pentas seni budaya.</p> <p>7. Pelatihan dan pengembangan pupuk organic, pakan ternak alternative,</p> <p>8. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana UMKM desa, serta emberian bantuan modal usaha dan pendampingan teknis pengembangan usaha.</p>
--	--	--	--	--

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
3	Girimulyo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan pertanian dan kehutanan yang melimpah.</li> <li>2. Lahan Hutan Desa seluas 883 Ha yang juga merupakan Hutan Rakyat.</li> <li>3. Sumber daya pertambangan, seperti: batu kapur dan stalaksit, dan stalaknit.</li> <li>4. Peternakan, seperti: sapi, kambing, ayam buras, dan ayam potong.</li> <li>5. UMKM seperti: kerajinan bambu, kayu, olahan makanan, dll.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya risiko kegagalan dalam budidaya pertanian, yang menyebabkan rendahnya hasil produksi dan posisi tawar produk pertanian, kurangnya informasi pasar, penguasaan IT dan lemahnya akses permodalan untuk sector pertanian.</li> <li>2. Terbatasnya penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada sentra ternak di musim kemarau.</li> <li>3. Rendahnya kompetensi manajemen asset desa.</li> <li>4. Maraknya pengebangan kayu liar sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan kelestarian hutan.</li> <li>5. Rendahnya investasi karena regulasi yang kurang adaptif dan produktif.</li> <li>6. Sempitnya lapangan pekerjaan karena minimnya keahlian/keterampilan masyarakat usia produktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian (<i>hand tractor, trisher/</i> mesin perontok padi, dan pemipil jagung, serta pembangunan lumbung desa</li> <li>2. Mengembangkan desa budaya demi menjaga nilai dan kearifan lokal budaya setempat, serta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.</li> <li>3. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan bantuan modal usaha untuk mendukung daya saing produk pertanian dan industry rumah tangga.</li> <li>4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik dasar (jalan, jembatan, penerangan jalan umum, drainase, dll) dan sarana prasarana perekonomian (pasar desa, kios desa, dll) yang berguna untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.</li> <li>5. Mengembangkan hutan wisata (wana wisata) yang tetap mempertahankan kearifan lokal setempat dan melakukan penghijauan desa.</li> <li>6. Memberikan pelatihan dan pendampingan, dan penguatan modal usaha dalam proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian, peternakan, UMKM, dan <i>home industry</i>.</li> </ol>

				<p>7. Menggiatkan pemanfaatan SID demi terbukanya akses informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah.</p> <p>8. Pengelolaan BUMDEs secara terpadu.</p> <p>9. Perlu adanya pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), dan kelompok ternak yang berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--

No	Desa	Potensi Desa	Kendala	Rekomendasi
4	Girisekar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pariwisata</li> <li>2. Hutan rakyat</li> <li>3. Batu Kapur</li> <li>4. Hasil perkebunan, seperti: melinjo, pisang, manga, pete.</li> <li>5. Adanya kelompok UMKM yang tersebar di seluruh padukuhan.</li> <li>6. Potensi seni dan budaya.</li> <li>7. Peternakan skala kecil dan besar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termasuk daerah rawan kekeringan.</li> <li>2. Tingginya risiko kegagalan dalam budidaya pertanian, yang menyebabkan rendahnya hasil produksi dan posisi tawar produk pertanian, kurangnya informasi pasar, penguasaan IT dan lemahnya akses permodalan untuk sector pertanian.</li> <li>3. Maraknya penebangan kayu liar sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan kelestarian hutan.</li> <li>4. Rendahnya investasi karena regulasi yang kurang adaptif dan produktif.</li> <li>5. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa.</li> <li>6. Kurangnya fasilitasi dan penataan lingkungan dan pemukiman desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kelompok ekonomi lokal desa baik berupa pemberian bantuan modal usaha kepada UMKM dan <i>home industry</i>, maupun pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan desa wisata budaya dan desa bahari.</li> <li>3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti: jalan, drainasi, sumber air bersih, penerangan jalan umum, irigasi, embung, dsb.</li> <li>4. Mengaktifkan dan mengembangkan pasar desa, kios desa, dan BUMDEs untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat.</li> <li>5. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan bantuan modal usaha untuk mendukung daya saing produk pertanian dan industry rumah tangga.</li> <li>6. Pengembangan kawasan agroindustry.</li> <li>7. Pengembangan dan pemuktahiran data dan profil desa, termasuk pemetaan potensi desa, serta mengintegrasikannya dengan SID.</li> </ol>